



2025-2029 RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH

**DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Hadiwijaya 44 Demak, 59511

 (0291) 685934

 dinkes@demakkab.go.id

 dinkes.demakkab.go.id/

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban.

Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis. Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak. dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak, maka Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak. Atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang kesehatan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu

tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dan Renstra Dinas Kesehatan Daerah adalah sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Daerah adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang kesehatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja PD) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah, sumber daya, kinerja pelayanan serta

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Daerah. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Uraian subkegiatan mendukung program prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak merupakan Dinas yang Menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan dalam bidang kesehatan, untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak dilakukan oleh 27 Puskesmas, 2 Rumah Sakit Umum Daerah, dan 1 Laboratorium Kesehatan Daerah.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Demak. Tugas Dinas Kesehatan Daerah Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Daerah Demak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

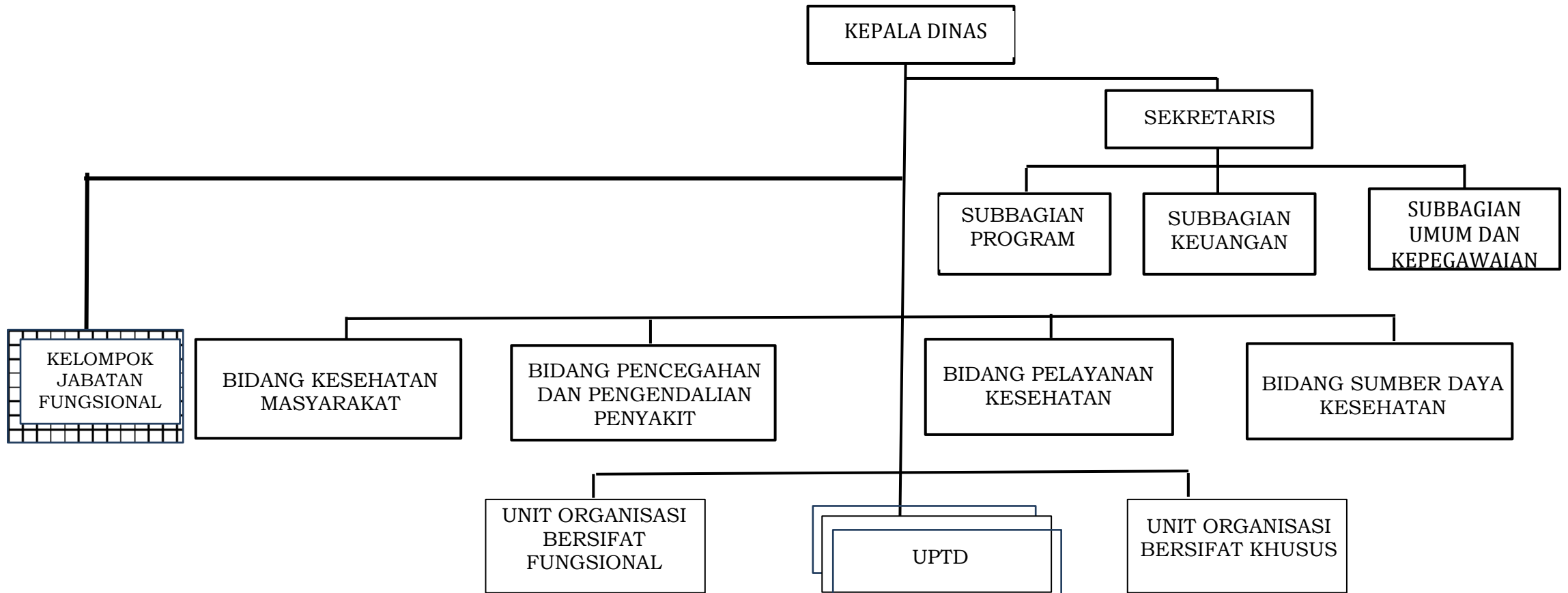
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Daerah Demak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- i. Unit Organisasi Bersifat Fungsional; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Daerah Demak sebagaimana tersaji pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
(Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2024)



b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Daerah Demak, uraian tugas jabatan struktural Dinas Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Pemberian Bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat;
2. Perumusan kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Pemberian Bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
3. Perumusan kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Pemberian Bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian dan alat kesehatan serta pendanaan kesehatan;
4. Perumusan kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Pemberian Bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan;
5. Pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
3. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:
 - a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b) Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
 - c) pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik Daerah;
 - d) Fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum Daerah;
 - e) penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
 - f) Koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
 - g) Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
 - h) Pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas;
 - i) Pengelolaan hubungan masyarakat;
 - j) Pengelolaan data dan sistem informasi;
 - k) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - l) Pelaksanaan urusan administrasi Dinas.
4. Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas:
 - a) Subbagian Program. Subbagian Program mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - 2) Koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
 - 3) Pengelolaan data dan sistem informasi;
 - 4) Koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
 - 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Subbagian Keuangan. Subbagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
 - 2) Fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah; dan
 - 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c) Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik Daerah;
 - 2) Penyusunan peraturan perundang-undangan,
 - 3) Penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
 - 4) Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta
 - 5) Fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
 - 6) Pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas;
 - 7) Pengelolaan hubungan masyarakat;
 - 8) Pelaksanaan urusan administrasi Dinas; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat

1. Bidang Kesehatan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di Bidang Kesehatan Masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat.
4. Bidang Kesehatan Masyarakat, melaksanakan fungsi:
 - a) Pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
 - b) Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program dan penggalangan kemitraan;
 - c) Pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan
 - d) Pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - e) Pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - f) Pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - g) Fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
 - h) Pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan

di pusat kesehatan masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;

- i) Penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
 - j) Penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
 - k) Perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - l) Pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
 - m) Pemberian bimbingan teknis pada upbd dinas;
 - n) Pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat; dan
 - o) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang kesehatan masyarakat, terdiri atas:
- a) Kelompok Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b) Kelompok Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c) Kelompok Substansi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan unsur pelaksana di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang.
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melaksanakan fungsi:
 - a) Pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - b) Pelaksanaan respon kejadian luar biasa, wabah, dan bencana;
 - c) Pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - d) Advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - e) Pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa dan imunisasi khusus;
 - f) Pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi;
 - g) Koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - h) Pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - i) Pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan dan pengamanan limbah serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;
 - j) Pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan kejadian luar biasa/wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
 - k) Pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - l) Pemberian bimbingan teknis pada upbd dinas;

- m) Pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - n) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas kelompok substansi. Kelompok substansi terdiri atas:
- a) Kelompok Substansi Surveilans dan Imunisasi;
 - b) Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan
 - c) Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan
- 1. Bidang Pelayanan Kesehatan merupakan unsur pelaksana di Bidang Pelayanan Kesehatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - 2. Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang.
 - 3. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan.
 - 4. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan melaksanakan fungsi:
 - a) Pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
 - b) Fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
 - c) Pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
 - d) Pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada

penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa dan situasi khusus lainnya;

- e) Fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f) Pengelolaan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan;
 - g) Pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;
 - h) Pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas;
 - i) Pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan; dan
 - j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas kelompok Substansi. Kelompok Substansi terdiri atas :
- a) Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b) Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Lanjutan; dan
 - c) Kelompok Substansi Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan

- 1. Bidang Sumber Daya Kesehatan merupakan unsur pelaksana di Bidang Sumber Daya Kesehatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2. Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang
- 3. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan.
- 4. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan melaksanakan fungsi:

- a) Pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - b) Pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - c) Pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
 - d) Pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - e) Pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - f) Peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
 - g) Pengelolaan pendanaan kesehatan;
 - h) Perencanaan, pengadaan serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - i) Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - j) Pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan; dan
 - k) Pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
 - l) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
 - m) Pemberian bimbingan teknis pada upkd dinas;
 - n) Pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya kesehatan; dan
 - o) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas kelompok substansi, kelompok substansi terdiri atas:
- a) Kelompok Substansi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

- b) Kelompok Substansi Pengelolaan Pendanaan Kesehatan; dan
- c) Kelompok Substansi Tata Kelola Sumber Daya Manusia Kesehatan.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah

1. Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

h. Unit Organisasi Bersifat Khusus

1. Pada Dinas terdapat rumah sakit daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memberikan layanan secara professional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

i. Unit Organisasi Bersifat Fungsional

1. Pada Dinas terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang memberikan layanan

secara professional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional sebagaimana dimaksud, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
3. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
4. Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Kesehatan Daerah Demak diklasifikasikan ke dalam tingkat pendidikan dan golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
A	Dinas Kesehatan							
1	SD	-	-	-	1	1	-	2
2	SMP Sederajat	1	-	-	-	-	-	1
3	SMA Sederajat	4	4	3	3	15	1	30
4	D3	1	1	-	1	6	6	15
5	S1	4	21	8	21	6	6	66
6	S2	6	8	-	-	-	-	14
7	S3	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	16	34	11	26	28	13	128
B	27 Puskesmas							
1	SD	-	-	-	-	2	5	7
2	SMP Sederajat	3	3	-	-	12	3	21
3	SMA Sederajat	13	21	5	3	38	32	112
4	D3	35	218	19	118	32	251	673
5	S1	73	422	7	29	25	113	669
6	S2	4	19	-	-	-	-	23
7	S3	-	1	-	-	-	-	1
	Jumlah	128	684	31	150	109	404	1506
C	RSUD Sultan Fatah							
1	SD	-	-	-	-	-	-	-

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	1	2	-	-	56	47	106
4	D3	2	35	-	12	54	115	218
5	S1	16	28	1	6	27	55	133
6	S2	9	11	-	1	13	7	41
7	S3	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	28	76	1	19	150	224	498
D	RSUD Sunan Kalijaga							
1	SD	-	-	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	1	1	-	-	1	-	3
3	SMA Sederajat	8	11	-	-	72	63	154
4	D1	-	1	-	-	2	1	4
5	D2	-	-	-	-	2	-	2
6	D3	14	57	4	4	68	192	339
7	S1	25	96	1	3	77	122	324
8	S2	15	12	-	-	16	19	62
9	S3	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	63	178	5	7	238	397	888
E	Laboratorium Kesehatan							
1	SD	-	-	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	1	1	1	-	3
3	SMA Sederajat	-	2	1	1	3	1	8
4	D3	3	1	-	-	-	1	5
5	S1	1	-	-	-	-	-	1
6	S2	-	-	-	-	-	-	-
7	S3	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	4	3	2	2	4	2	17
TOTAL		239	975	50	204	529	1040	3.037

Dari jumlah pegawai sebanyak 3.037 terdiri dari PNS sebanyak 1.214 terdiri dari 239 pegawai laki-laki atau 7,78% dan 975 pegawai perempuan atau 32,10%. PPPK sebanyak 254 orang terdiri dari 50 pegawai laki-laki atau 1,65% dan 204 pegawai perempuan atau 6,72%, dan pegawai Non ASN sebanyak 1.569 terdiri dari 529 Laki-laki atau 17,42% dan 1.040 Perempuan atau 34,24%. Berdasarkan kualifikasi

golongan, pegawai di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak terdiri atas PPPK dan PNS Golongan II, III, dan IV sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
A.	Dinas Kesehatan			
1	Non ASN	28	13	41
2	PPPK	11	26	37
3	PNS Golongan II	3	4	7
4	PNS Golongan III	10	22	32
5	PNS Golongan IV	4	7	11
	Jumlah	56	72	128
B.	Puskesmas			
1	Non ASN	110	403	513
2	PPPK	30	152	182
3	PNS Golongan II	22	72	94
4	PNS Golongan III	85	513	598
5	PNS Golongan IV	22	97	119
	Jumlah	269	1237	1506
C.	RSUD Sunan Kalijaga			
1	Non ASN	238	397	635
2	PPPK	5	7	12
3	PNS Golongan II	10	42	52
4	PNS Golongan III	26	97	123
5	PNS Golongan IV	24	42	66
	Jumlah	303	585	888
D.	RSUD Sultan Fatah			
1	Non ASN	150	224	374
2	PPPK	1	19	20
3	PNS Golongan II	2	16	18
4	PNS Golongan III	13	39	52
5	PNS Golongan IV	12	22	34
	Jumlah	178	320	498
E.	Labkesda			
1	Non ASN	4	2	6
2	PPPK	2	2	4
3	PNS Golongan II	-	-	-
4	PNS Golongan III	2	3	5
5	PNS Golongan IV	2	-	2
	Jumlah	10	7	17

a. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak berasal dari APBD maupun Hibah dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Dinas Kesehatan Daerah

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan	
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal					Nomor
DINKESDA											
1	Tanah Bangunan Gudang	1.004.00	1992	Jl. Sultan Hadwijaya No. 44 Kel. Mangunjiwan	Hak Pakai	11/23/1992	11.09.12.04.4 .00021	Kantor Farmasi	Pembelian	100.400,00	Tanah Eks Gudang POM
2	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	834.00	1992	Jl. Sultan Hadwijaya No. 44 Kel. Mangunjiwan	Hak Pakai	11/23/1992	11.09.12.04.4 .00022	Kantor DKK	Hibah	83.400,00	Tanah Bangunan Tempat Kerja DKI (Eks Kandep)
3	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1.572.00	1992	Jl. Sultan Hadwijaya No. 44 Kel. Mangunjiwan	Hak Pakai	9/4/1999	11.09.12.04.4 .00030	Kantor DKK	Pembelian	157.200,00	Tanah Bangunan Tempat Kerja DKI
4	Tanah Kampung Lainnya	1.708.00	2000	Jl. Sultan Hadwijaya No. 44 Kel. Mangunjiwan	Hak Pakai	6/12/2001	11.09.12.04.4 .00031	Command Center	Pembelian	170.800,00	Tanah Bangunan Gedung Eks Lab Kes
BONANG I											
1	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1.256,00	1991	Jl. Demak - Moro No.50 Desa Tridonorejo Kec. Bonang Kab. Demak	Hak pakai	06/11/1992	11.09.13.13.4 .00002	Puskesmas Bonang I	Hibah	62.800.000,00	
BONANG II											
1	Tanah Puskesmas	5352		Jl.Raya Wedung Demak KM10 desa Serangan	Pinjam Pakai	01/11/2022	11.09.13.20.4 .00018	Puskesmas Bonang II	Tanah Desa	0,00	
DEMAK I											
1	Tanah bangunan Puskesmas	1594	1992	Jl. Pemuda No.61 Bintoro Demak	Hak Pakai	22-6-1992	11.09.12.05.4 .00052	Bangunan Puskesmas	Tanah milik Pemda	239.100,00	
DEMAK II											
1	Tanah Desa										
DEMPET											
1	tanah bangunan tempat kerja lainnya	548	2021	Jl Raya Dempet Gajah	pakai	01/01/00	DEMPET HP 00130	Lapangan Puskesmas	pembelian	70.144.000,00	Sertifikat dalam proses
GAJAH I											
	Puskesmas Gajah I	16.080	2019	Desa Gajah	Pakai	26/12/2019	11.09.09.16.4 .00015	Puskesmas Gajah I	Hibah	0,00	

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan	
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal					Nomor
GAJAH II											
1	Puskesmas Gajah II	3216	2013	Jl. Cangkring Tompe Desa Tambirejo	Pakai	14 March 2013	11.09.09.09.00136	Puskesmas	Milik Pemdes		
GUNTUR I											
	Tanah Bangunan puskesmas/Posyandu	1.760,00	2019	RT 7 RW 2 Desa Guntur Kec. Guntur Kab. Demak	Hak Pakai	2020/04/07	11.09.04.14.40.00011	PUSKESMAS GUNTUR 1	Pembelian	980.960.000,00	
KARANGANYAR I											
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	560,00	1991	karanganyar	hak pakai	06/11/1992	11.09.10.10.40.00014	puskesmas	Pembelian	84.000,00	
2	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	553,00	1991	karanganyar	hak pakai	06/11/1992	11.09.10.10.40.00013	puskesmas	Pembelian	27.650,00	
3	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	574,00	1991	karanganyar	hak pakai	06/11/1992	11.09.10.10.40.00015	puskesmas BKIA	Hibah	17.220,00	
KARANGANYAR II											
1	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1.152			Hak pakai				Pembelian	94.464.000,00	
2	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	720			Hak pakai				Pembelian	59.040.000,00	
KARANGAWEN I											
1	Tanah	3333	1992	Jl smg - pwd km.21 Karangawen	Hak pakai	09/03/2011	11.09.03.10.40.00007	Puskesmas	Pembelian	189.750,00	
		1.408	2022	Jl smg - pwd km.21 Karangawen	Hak pakai	12/2/2024	11.09.03.10.40.00042	Rumah dinas	Pembelian	653.312,00	
KARANGTENGAH I											
1	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2.236	1992	Jl. Raya Demak-Semarang (Buyaran) KM 7 Demak Kode Pos 59561	Hak Pakai	28/07/1992	11.09.06.08.40.0004	Untuk Puskesmas Karangtengah	Pembelian	111.800,00	
MIJEN I											
1	Tanah Bangunan Puskesmas / Posyandu	934	1991	Jl. Raya Mijen Demak No. 68,kode pos 59583	Hak Pakai	6/11/1992	11.09.11.08.40.00009	Puskesmas	Pembelian	46.700.000,00	
MRANGGEN I											
1	Tanah bangunan puskesmas	1594 M ²	1988	JL Raya Mranggen No. 90 , Kec.	Hak Pakai	21/07/1988	1168./1988	Puskesmas Mranggen I	-	-	

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan	
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal					Nomor
				Mranggen, Kab. Demak							
SAYUNG I											
1	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	3.984,00	1991	Jl. Raya Semarang - Demak Km.9, Sayun Demak 59563	Hak Pakai	08/09/1993	11.09.05.14.4 .00003	Puskesmas Sayung I	Hibah	597.600,00	
WONOSALAM I											
1	Tanah	1400		Puskesmas Induk Wonosalam I - Jl. Demak-Purwodadi km 5,5 Pilangrejo, Wonosalam, Demak	Tanah Hak Lainnya (Pemerintah Desa Pilangrejo)	30/03/2020	031/II/IV/2020	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Pinjam Tanah		MoU Pinjam Tanah Pemdes Pilangrejo dengan Puskesmas Wonosalam I
LABKES											
1	UPTD LabKes	624		Jl. Sultan Hadwijaya No. 47 Demak	Hak Pakai	01/05/2009	11.09.12.04.4 .00054				

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Daerah

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
Dinkesda								
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	602,43	Jl. Sultan Hadiwijaya No. 44 Kel. Mangunjiwan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.675.663,61
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	433	Jl. Sultan Hadiwijaya No. 44 Kel. Mangunjiwan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	661.954,86
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	160	Jl. Sultan Hadiwijaya No. 44 Kel. Mangunjiwan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.865.594,40
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	192	Jl. Sultan Hadiwijaya No. 44 Kel. Mangunjiwan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.113.512,00
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Baik	68	Jl. Sultan Hadiwijaya No. 44 Kel. Mangunjiwan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	36.097,50
6	Bangunan Gudang Lain-Lain	Baik	56	Jl. Sultan Hadiwijaya No. 44 Kel. Mangunjiwan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	286.345,08
7	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Baik	110	Jl. Sultan Hadiwijaya No. 44 Kel. Mangunjiwan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	259.722,00
8	Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain Dst	Baik	52	Jl. Sultan Hadiwijaya No. 44 Kel. Mangunjiwan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.567.692,71
9	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik	200	Jl. Sultan Hadiwijaya No. 44 Kel. Mangunjiwan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	176.853,00
10	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	150	Jl. Sultan Hadiwijaya No. 44 Kel. Mangunjiwan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	352.450,00
11	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Kurang Baik	9	Jl. Sultan Hadiwijaya No. 44 Kel. Mangunjiwan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	252.086,00
12	Rumah Negara Gol II Lain-Lain	Baik	80	Jl. Sultan Fatah			Pembelian	158.100,00
13	Rumah Negara Gol III Lain-Lain	Baik	156	Jl. Sultan Hadiwijaya No. 44 Kel. Mangunjiwan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	320.390,38
14	Pagar Permanen	Baik	52	Jl. Sultan Hadiwijaya No. 44 Kel. Mangunjiwan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	215.577,18
15	Pagar Permanen	Baik	30	Dinkesda			Pembelian	197.026,00
Bonang I								

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	50.4	Jl. Demak - Moro No.50		Tanah Milik Pemda	Pembelian	521.267,58
2	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	5	Jl. Demak - Moro No.50		Tanah Milik Pemda	Pembelian	138.490,88
3	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	454	Jl. Demak - Moro No.50		Tanah Milik Pemda	Pembelian	928.566,56
4	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	100	Jl. Demak - Moro No.50		Tanah Milik Pemda	Pembelian	266.961,38
5	Bangunan Klinik/Puskesmas	Rusak	110	Desa Karangrejo		Tanah Hak Lainnya	Hibah	134.431,00
6	Bangunan Klinik/Puskesmas	Rusak	104	Desa Sumberejo		Tanah Hak Lainnya	Hibah	122.088,88
7	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	400	Jl. Demak - Moro No.50		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.884.576,67
8	Gedung Garasi/Pool Permanen	Baik	40	Jl. Demak - Moro No.50		Tanah Milik Pemda	Pembelian	95.000,00
9	Pagar Permanen	Baik	46,5	Jl. Demak - Moro No.50		Tanah Milik Pemda	Pembelian	95.578,00
Demak I								
1	Bangunan IPAL Puskesmas	B	5	Jl. Pemuda No. 61 Bintoro Demak	5	Tanah milik Pemda	Pembelian	38.884,88
2	Bangunan Pustu Betokan	KB	70	Krajan Kelurahan Betokan	590	Tanah milik Pemda	Pembelian	139.639,00
3	Bangunan Pustu Karangmlati	KB	72	Desa Karangmlati Demak	225	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	139.617,00
4	Bangunan Gedung Puskesmas Demak I	B	445	Jl. Pemuda No. 61 Bintoro Demak	756	Tanah milik Pemda	Pembelian	1.296.695,08
5	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-Lain	B	5	Jl. Pemuda No. 61 Bintoro Demak		Tanah milik Pemda	Pembelian	15.000,00
Demak II								
1	Bangunan Klinik/Puskesmas (Gedung A)	B	162	Jl.Raya Demak-Mijen KM 9 Ds.Mulyorejo, Demak			Hibah	1.265.571.530,00
2	Bangunan Klinik/Puskesmas (Gedung B)	B	458,3	Jl.Raya Demak-Mijen KM 9 Ds.Mulyorejo, Demak			Pembelian	1.719.228.000,00
3	Bangunan Klinik/Puskesmas (Pustu Bango)	KB	60	Desa Bango			Pembelian	260.070.340,00
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain (Pustu Turirejo)	B	72	Desa Turirejo			Pembelian	267.617.000,00
Demak III								
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	630	Jl. Cempaka Raya No.5 Wiku 2		Tanah hak lainnya	Pembelian	609.702,00

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
				Katonsari Demak				
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	45,31	Jl. Cempaka Raya No.5 Wiku 2 Katonsari Demak		Tanah hak lainnya	Pembelian	7.500,00
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Baik	261	Jl. Cempaka Raya No.5 Wiku 2 Katonsari Demak		Tanah hak lainnya	Pembelian	19.575,00
4	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	5	Jl. Cempaka Raya No.5 Wiku 2 Katonsari Demak		Tanah hak lainnya	Pembelian	38.884,88
5	Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain	Baik	44,4	Ds. Prigi Kalikondang Demak		Tanah hak lainnya	Pembelian	107.210,38
6	Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain	Baik	24	Ds. Cabean Demak		Tanah hak lainnya	Pembelian	9.000,00
7	Rumah Negara Golongan III Lain-Lain	Baik	8	Jl. Cempaka Raya No.5 Wiku 2 Katonsari Demak		Tanah hak lainnya	Pembelian	148.791,00
8	Rumah Negara Golongan III Lain-Lain	Baik	120	Jl. Cempaka Raya No.5 Wiku 2 Katonsari Demak		Tanah hak lainnya	Pembelian	166.640,00
9	Rumah Negara Golongan III Lain-Lain	Baik	72	Jl. Cempaka Raya No.5 Wiku 2 Katonsari Demak		Tanah hak lainnya	Pembelian	91.970,00
10	Pagar Permanen	Baik	1953	Jl. Cempaka Raya No.5 Wiku 2 Katonsari Demak		Tanah hak lainnya	Pembelian	4.000,00
Dempet								
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	216,09	Jl Raya Dempet-Gajah , Dempet, Kec. Dempet Kabupaten Demak Jawa Tengah 59573	216,09	Tanah hak lainnya	Pembelian	893.045,25
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rusak Berat	88	Desa Karangrejo Kec Dempet	88	Tanah hak lainnya	Pembelian	303.529,38
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	8	Desa Dempet -Gajahkm 1 Kec Dempet Demak Jawatengah	8	Tanah hak lainnya	Pembelian	175.485,00
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	21,5	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawatengah 59373	21,5	Tanah hak lainnya	Pembelian	22.801,00
5	Bangunan Gedung Lain Lain	Baik	20	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawatengah 59373	20	Tanah hak lainnya	Pembelian	117.696,74
6	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Baik	6	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawatengah	6	Tanah hak lainnya	Pembelian	11.500,00

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
				59373				
7	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	294	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawa Tengah 59373	294	Tanah hak lainnya	Pembelian	1.031.419,46
8	Bangunan Klinik/Puskesmas	Rusak Berat	300	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawa Tengah 59373	300	Tanah hak lainnya	Pembelian	703.08,00
9	Bangunan Klinik/Puskesmas	Rusak Ringan	75	Desa Balerejo	75	Tanah hak lainnya	Pembelian	259.448,56
10	Bangunan Klinik/Puskesmas	Rusak Berat	75	Desa Harjowinangun	75	Tanah hak lainnya	Pembelian	19.591,47
11	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	12	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawa Tengah 59373	12	Tanah hak lainnya	Pembelian	59.500,00
12	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Lainnya	Baik	5	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawa Tengah 59373	5	Tanah hak lainnya	Pembelian	57.665,00
13	Bangunan Rumah Sakit Lain Lain	baik	9	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawa Tengah 59373	9	Tanah hak lainnya	Pembelian	36.356,00
14	Gedung Garasi/Pol Semi Permanen	baik	75	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawa Tengah 59373	75	Tanah hak lainnya	Pembelian	29.480,00
15	Bangunan Gedung Garasi /Poll Lain Lain	baik	100	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawa Tengah 59373	100	Tanah hak lainnya	Pembelian	18.000,00
16	Bangunan Gedung Tempat Kerja Laiinya Permanen	baik	30	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawa Tengah 59373	30	Tanah hak lainnya	Pembelian	50.000,00
17	Bangunan Gedung Tempat Kerja Laiinya Permanen	baik	20,8	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawa Tengah 59373	20,8	Tanah hak lainnya	Pembelian	47.000,00
18	Bangunan Gedung Tempat Kerja Laiinya Permanen	baik	4	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawa Tengah 59373	4	Tanah hak lainnya	Pembelian	9.758,00
19	Bangunan Tempat Kerja Lain Lain	baik	8	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1	8	Tanah hak lainnya	Pembelian	46.750,00

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
				Kec Dempet -Demak Jawa Tengah 59373				
20	Bangunan Tempat Kerja Lain Lain	baik	4	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawa Tengah 59373	4	Tanah hak lainnya	Pembelian	47.900,00
21	Bangunan Tempat Kerja Lain Lain	baik	280	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawa Tengah 59373	280	Tanah hak lainnya	Pembelian	57.573,00
22	Bangunan Tempat Kerja Lain Lain	baik	435,28	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawa Tengah 59373	435,28	Tanah hak lainnya	Pembelian	205.256,39
23	Tanam Lainnya	baik	6	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawa Tengah 59373	6	Tanah hak lainnya	Pembelian	29.585,00
24	Pager Permanen	baik	2296	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawa Tengah 59373	2296	Tanah hak lainnya	Pembelian	1.800,00
25	Pagar Permanen	baik	140	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawa Tengah 59373	140	Tanah hak lainnya	Pembelian	160.325,00
26	Pagar Permanen	baik	55.5	Jalan Raya Dempet-Gajah Km 1 Kec Dempet -Demak Jawa Tengah 59373	55,5	Tanah hak lainnya	Pembelian	131.296,00
Gajah I								
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	51.29	Jl. Raya Gajah No.8, Gajah, Kec. Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59581	51.29	Tanah Milik Pemda	Pembelian	247.195,50
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	2	Jl. Raya Gajah No.8, Gajah, Kec. Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59581	2	Tanah Milik Pemda	Pembelian	9.000,00
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Baik	84	Jl. Raya Gajah No.8, Gajah, Kec. Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59581	84	Tanah Milik Pemda	Pembelian	10.050,00
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Baik	12.95	Jl. Raya Gajah No.8, Gajah, Kec.	12.95	Tanah Milik Pemda	Pembelian	10.000,00

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
				Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59581				
5	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	125	Jl. Raya Gajah No.8, Gajah, Kec. Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59581	125	Tanah Milik Pemda	Pembelian	431.410,00
6	Bangunan Klinik/Puskesmas	Kurang Baik	225	Jl. Raya Gajah No.8, Gajah, Kec. Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59581	225	Tanah Milik Pemda	Pembelian	143.887,51
7	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	633	Jl. Raya Gajah No.8, Gajah, Kec. Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59581	633	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.745.753,00
8	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	2	Jl. Raya Gajah No.8, Gajah, Kec. Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59581	2	Tanah Milik Pemda	Pembelian	45.000,00
9	Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain	Baik	90	Ds Tlogo pandogan	90	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	150.200,54
10	Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain	Kurang Baik	80	Jl. Raya Gajah No.8, Gajah, Kec. Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59581	80	Tanah Milik Pemda	Pembelian	98.674,00
11	Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain	Baik	80	Jl. Raya Gajah No.8, Gajah, Kec. Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59581	80	Tanah Milik Pemda	Pembelian	44.000,00
12	Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain	Baik	513	Jl. Raya Gajah No.8, Gajah, Kec. Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59581	513	Tanah Milik Pemda	Pembelian	174.745,00
13	Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain	Baik	1.2	Jl. Raya Gajah No.8, Gajah, Kec. Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59581	1.2	Tanah Milik Pemda	Pembelian	10.000,00
14	Gedung Garasi/Pool Permanen	Baik	48	Jl. Raya Gajah No.8, Gajah, Kec. Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59581	48	Tanah Milik Pemda	Pembelian	53.430,76
15	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	84	Jl. Raya Gajah No.8, Gajah, Kec. Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59581	84	Tanah Milik Pemda	Pembelian	15.000,00
16	Pagar Permanen	Baik	29	Jl. Raya Gajah No.8, Gajah, Kec. Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59581	29	Tanah Milik Pemda	Pembelian	25.000,00

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
				Tengah 59581				
17	Pagar Permanen	Baik	14.34	Jl. Raya Gajah No.8, Gajah, Kec. Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59581	14.34	Tanah Milik Pemda	Pembelian	167.084,50
Gajah II								
1	Gedung Rawat Jalan	B	165	Jl. Cangkring Tompe Desa Tambirejo	165	Milik Pemdes		
2	Gedung Rawat Inap	B	207	Jl. Cangkring Tompe Desa Tambirejo	207	Milik Pemdes		
3	Gedung Administrasi	B	345	Jl. Cangkring Tompe Desa Tambirejo	345	Milik Pemdes		975.000.000,00
Guntur I								
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	514	Jalan Raya Guntur Buyaran		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.344.007,24
2.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	B	70	Jalan Raya Guntur No.226 Kec.Guntur		Tanah Milik Pemda	Pembelian	28.000.000,00
3.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	B	3	Jalan Raya Guntur No.226 Kec.Guntur		Tanah Milik Pemda	Pembelian	13.000.000,00
4.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	B	62,5	Puskesmas Guntur I Demak		Tanah Milik Pemda	Pembelian	13.000.000,00
5.	Bangunan Kliik/Puskesmas	KB	620	Jalan Raya Guntur No.226 Kec.Guntur		Tanah Milik Pemda	Pembelian	395.632.150,00
6.	Bangunan Kliik/Puskesmas	B	305	Jalan Raya Guntur No.226 Kec.Guntur		Tanah Milik Pemda	Pembelian	127.000.000,00
7.	Bangunan Kliik/Puskesmas	KB	320	Desa Tlogoweru Kec.Guntur		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	134.435.000,00
8.	Bangunan Kliik/Puskesmas	B	45	Desa Turitempel Kec Guntur		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	139.799.000,00
9.	Bangunan Kliik/Puskesmas	B	320	Desa Temuroso Kec Guntur		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	231.392.140,00
10.	Bangunan Kliik/Puskesmas	B	1185	Jalan Raya Guntur No.226 Kec.Guntur		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	2.017.433.480,00
11.	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	B	170	Jalan Raya Guntur No.226 Kec.Guntur		Tanah Milik Pemda	Pembelian	40.000.000,00
12.	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	B	170	Jalan Raya Guntur No.226 Kec.Guntur		Tanah Milik Pemda	Pembelian	34.578.000,00
13.	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	B	168	Pustu Desa Temuroso		Tanah hak Pakai	Pembelian	30.000.000,00

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
14.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	B	470	Jalan Raya Guntur No.226 Kec.Guntur		Tanah Milik Pemda	Pembelian	202.621.670,00
15.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	B	178,1	Jalan Raya Guntur No.226 Kec.Guntur		Tanah Milik Pemda	Pembelian	74.211.760,00
16.	Pagar Permanen	B	28,3	Jalan Raya Guntur No.226 Kec.Guntur		Tanah Milik Pemda	Pembelian	137.394.000,00
17.	Pagar Permanen	B	90	Jalan Raya Guntur No.226 Kec.Guntur		Tanah Milik Pemda	Pembelian	31.500.000,00
Karanganyar I								
1	Bangunan Klinik/Puskesmas	B	863	Puskesmas Karanganyar I	863	Tanah pemkab	Hibah	2.468.976,21
2	Bangunan Klinik/Puskesmas	B	72	Puskesmas Karanganyar I	72	Tanah pemkab	Hibah	260.069,30
3	Bangunan Klinik/Puskesmas	B	70	Puskesmas Karanganyar I	70	Tanah pemkab	Hibah	231.058,51
Karanganyar II								
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	937,5	Jl.Raya Karanganyar- Mijen ,Ds.Kedungwaru Lor,Kec.Karanganyar,Kab. Demak		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	895.358.000,00
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	15974	Jl.Raya Karanganyar- Mijen ,Ds.Kedungwaru Lor,Kec.Karanganyar,Kab. Demak		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	589.040.000,00
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	367,1	Jl.Raya Karanganyar- Mijen ,Ds.Kedungwaru Lor,Kec.Karanganyar,Kab. Demak		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	1.971.881.000,00
4	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Baik	9	Jl.Raya Karanganyar- Mijen ,Ds.Kedungwaru Lor,Kec.Karanganyar,Kab. Demak		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	11.954.870,00
5	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Baik	58	Jl.Raya Karanganyar- Mijen ,Ds.Kedungwaru		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	52.000.000,00

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
				Lor,Kec.Karanganyar,Kab.Demak				
6	Bangunan Klinik /Puskesmas	Baik	48	Ds.Bandungrejo Kec.Karanganyar		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	240.500.880,00
7	Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain	Baik	100	Jl.Raya Karanganyar- Mijen ,Ds.Kedungwaru Lor,Kec.Karanganyar,Kab.Demak		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	53.000.000,00
8	Banguna Tempat Tinggal Lainnya	Baik	43,18	Jl.Raya Karanganyar- Mijen ,Ds.Kedungwaru Lor,Kec.Karanganyar,Kab.Demak		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	38.166.000,00
9	Pagar Permanen	Baik	3	Jl.Raya Karanganyar- Mijen ,Ds.Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar,Kab.Demak		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	4.950.000,00
Karangawen I								
1	Puskesmas (Gedung L)	B	309.1	Jl Raya Smg-Pwd Km 21 Karangawen		Tanah milik Pemda		1.263.954.900,00
2	Ugd Dan Rawat Inap	B	608	Jl Raya Smg-Pwd Km 21 Karangawen		Tanah milik Pemda		1.816.105.200,00
3	Rumah Dinas	RB	121	Jl Raya Smg-Pwd Km 21 Karangawen		Tanah milik Pemda		115.500.000,00
4	Pustu Pundenarum	B	90	Jl Raya Smg-Pwd Km 21 Karangawen		Tanah milik Pemda		327.672.570,00
5	Dapur	B	90	Jl Raya Smg-Pwd Km 21 Karangawen		Tanah milik Pemda		4.950.000,00
6	Linen	B	60	Jl Raya Smg-Pwd Km 21 Karangawen		Tanah milik Pemda		3.600.000,00
7	Musholla Pegawai	KB	4	Jl Raya Smg-Pwd Km 21 Karangawen		Tanah milik Pemda		13.185.000,00
8	Puskesmas (Rawat Jalan)	B	695	Jl Raya Smg-Pwd Km 21 Karangawen		Tanah milik Pemda		857.889.000,00
9	Garasi Mobil	B	40	Jl Raya Smg-Pwd Km 21 Karangawen		Tanah milik Pemda		49.677.000,00
10	Pagar Samping Kiri	B	92	Jl Raya Smg-Pwd Km 21 Karangawen		Tanah milik Pemda		144.553.000,00
Karangtengah								

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pagar Teralis)	Baik	5	Jl. Raya Demak - Semarang (Buyaran) KM 7 Demak Kode Pos 59561		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.362,50
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain (Pagar Teralis)	Baik	5	Jl. Raya Demak - Semarang (Buyaran) KM 7 Demak Kode Pos 59561		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.362,50
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain (Pagar Teralis)	Baik	5	Jl. Raya Demak - Semarang (Buyaran) KM 7 Demak Kode Pos 59561		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.362,50
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain (Pagar Teralis)	Baik	5	Jl. Raya Demak - Semarang (Buyaran) KM 7 Demak Kode Pos 59561		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.362,50
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain (Pustu Sampang)	Baik	72	Pustu Sampang			Pembelian	269.217,99
6	Bangunan Gudang Terbuka Permanen (Karangtengah 1)	Baik	5	Jl. Raya Demak - Semarang (Buyaran) KM 7 Demak Kode Pos 59561		Tanah Milik Pemda	Pembelian	38.884,88
7	Bangunan Klinik/Puskesmas (Gedung Puskesmas Karangtengah)	Baik	245	Jl. Raya Demak - Semarang (Buyaran) KM 7 Demak Kode Pos 59561		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.181.500,49
8	Bangunan Klinik/Puskesmas (Gedung Pustu Batu)	Rusak Berat	112	Desa Batu		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	133.956,00
9	Bangunan Klinik/Puskesmas (Gedung Pustu Grogol)	Rusak Sedang	207	Desa Grogol		Tanah Milik Pemda	Pembelian	102.500,00
10	Bangunan Klinik/Puskesmas (Gedung Pustu Tambakbulusan)	Rusak Sedang	119	Desa Tambak bulusan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	139.166,00
11	Bangunan Klinik/Puskesmas (Puskesmas Karangtengah)	Baik	336	Jl. Raya Demak - Semarang (Buyaran) KM 7 Demak Kode Pos 59561		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.445.337,86
12	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain (Paket Pemasangan Paving Hexagonal)	Baik	87	Jl. Raya Demak - Semarang (Buyaran) KM 7 Demak Kode Pos 59561		Tanah Milik Pemda	Pembelian	39.867,00
13	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya (Pembangunan Kamar Mandi Ruang)	Baik	4.2	Jl. Raya Demak - Semarang (Buyaran) KM 7 Demak Kode Pos		Tanah Milik Pemda	Pembelian	24.959,00

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
	Persalinan)			59561				
14	Taman Permanen (Taman)	Baik	24	Jl. Raya Demak - Semarang (Buyaran) KM 7 Demak Kode Pos 59561		Tanah Milik Pemda	Pembelian	82.885,89
15	Pagar Permanen (Dana Aspirasi)	Baik	58	Jl. Raya Demak - Semarang (Buyaran) KM 7 Demak Kode Pos 59561		Tanah Milik Pemda	Hibah	99.600,00
16	Pagar Permanen (Pagar Besi Dan Tembok Sepanjang 25 M)	Baik	25	Jl. Raya Demak - Semarang (Buyaran) KM 7 Demak Kode Pos 59561		Tanah Milik Pemda	Pembelian	29.912,00
Kebonagung								
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Rawat Anap)	B	450	Jl Semarang Purwodadi KM 37 Kebonagung Demak		Tanah hak lainnya	Pembelian	646.398,00
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Poskesdes Sukokidul)	B	120	Sukokidul, kebonagung, demak		Tanah hak lainnya	Pembelian	152.127,70
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pustu Tlogosih)	RB	120	Tlogosih, kebonagung, Demak		Tanah hak lainnya	Pembelian	121.988,88
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Smoking Area)	B	6	Jl Semarang Purwodadi KM 37 Kebonagung Demak		Tanah hak lainnya	Pembelian	13.185,00
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Incenerator)	B	12	Jl Semarang Purwodadi KM 37 Kebonagung Demak		Tanah hak lainnya	Pembelian	11.500,00
6	Bangunan Klinik/Puskesmas (Puskesmas Rawat Jalan)	B	426	Jl Semarang Purwodadi KM 37 Kebonagung Demak		Tanah hak lainnya	Pembelian	910.353,63
7	Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain	B	6,00	Jl Semarang Purwodadi KM 37 Kebonagung Demak		Tanah hak lainnya	Pembelian	15.393,25
8	Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain	B	9	Jl Semarang Purwodadi KM 37 Kebonagung Demak		Tanah hak lainnya	Pembelian	6.123,50
9	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	B	200	Jl Semarang Purwodadi KM 37 Kebonagung Demak		Tanah hak lainnya	Pembelian	37.233,25
Mijen I								
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	951,5	Jl. Raya Mijen Demak No. 68,kode pos 59583		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.453.594.000,00
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	B	40	Jl. Raya Mijen Demak No. 68,kode pos 59584		Tanah Milik Pemda	Pembelian	19.775.000,00

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	B	24	Jl. Raya Mijen Demak No. 68,kode pos 59585		Tanah Milik Pemda	Pembelian	5.240.200,00
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	B	141	Jl. Raya Mijen Demak No. 68,kode pos 59586		Tanah Milik Pemda	Pembelian	113.927.350,00
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	B	30,8	Jl. Raya Mijen Demak No. 68,kode pos 59587		Tanah Milik Pemda	Pembelian	10.495.500,00
6	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	B	3	Jl. Raya Mijen Demak No. 68,kode pos 59588		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.400.000,00
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	B	3	Jl. Raya Mijen Demak No. 68,kode pos 59589		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.400.000,00
8	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	B	72	PUSTU MLATEN		Tanah Milik Pemda	Pembelian	268.951.790,00
9	Bangunan Klinik/Puskesmas	KB	600	Jl. Raya Mijen Demak No. 68,kode pos 59589		Tanah Milik Pemda	Pembelian	948.434.530,00
10	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Permanen	KB	8	Jl. Raya Mijen Demak No. 68,kode pos 59590		Tanah Milik Pemda	Pembelian	8.000.000,00
11	Rumah Negara Golongan Iii Tipe A Permanen	KB	63	Jl. Raya Mijen Demak No. 68,kode pos 59591		Tanah Milik Pemda	Pembelian	98.724.000,00
12	Rumah Negara Golongan Iii Tipe A Permanen	B	48	Jl. Raya Mijen Demak No. 68,kode pos 59592		Tanah Milik Pemda	Pembelian	50.000.000,00
13	Rumah Negara Golongan Iii Tipe A Permanen	B	48	Jl. Raya Mijen Demak No. 68,kode pos 59593		Tanah Milik Pemda	Pembelian	50.000.000,00
14	Rumah Negara Golongan Iii Tipe A Permanen	B	48	Jl. Raya Mijen Demak No. 68,kode pos 59594		Tanah Milik Pemda	Pembelian	50.000.000,00
15	Pagar Permanen	B	30	Jl. Raya Mijen Demak No. 68,kode pos 59595		Tanah Milik Pemda	Pembelian	75.000.000,00
16	Pagar Permanen	B	1000	Jl. Raya Mijen Demak No. 68,kode pos 59596		Tanah Milik Pemda	Pembelian	32.822.000,00
17	Pagar Permanen	B	34	Puskesmas Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	19.079.780,00
18	Tugu/Tanda Batas Lainnya	B	200	Jl. Raya Mijen Demak No. 68,kode pos 59596		Tanah Milik Pemda	Pembelian	10.000.000,00
Mijen II								
1	Bangunan Klinik/Puskesmas	B	499.16	Jl.Mijen-Jleper Kec.Mijen-Demak 59583	499.16	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	2.122.272,21
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	50	PKM Mijen 2	50		Pembelian	483.094,47

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
3	Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain	KB	47.74	Desa Ngegot Rt 4/1 Kec.Mijen-Demak	47.74	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	158.258,88
4	Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain	B	37.2	Jl.Mijen-Jleper Kec.Mijen-Demak 59583	37.2	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	14.999,12
Mranggen II								
1	Gedung Puskesmas	B	1519	Jl. Raya Waru-Onggorawe	2302	Tanah hak lainnya	Pembelian	2.683.353.080
2	Pustu Candisari	B	109,1	Jl. Raya Candisari	109,06	Tanah hak lainnya	Pembelian	239.392.140
3	Pustu Jamus	B	123,1	Jl. Raya Jamus	123,065	Tanah hak lainnya	Pembelian	249.282.770
Sayung I								
1.	Bangunan Klinik/Puskesmas	KB	70	Desa Surodadi		Tanah Hak Pakai	Pembelian	182.995.000,00
2.	Bangunan Klinik/Puskesmas	KB	70	Desa Bedono, Kec.Sayung		Tanah Hak Pakai	Pembelian	205.000.000,00
3.	Bangunan Klinik/Puskesmas	B	256	Jl. Raya Semarang -Demak Km.9, Sayung Demak Km.9, Sayung Demak 59563		Tanah Hak Pakai	Pembelian	1.510.922.660,00
4.	Bangunan Klinik/Puskesmas	B	389.68	Jl. Raya Semarang -Demak Km.9, Sayung Demak Km.9, Sayung Demak 59563		Tanah Hak Pakai	Pembelian	3.127.059.090,00
5.	Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain (Paving)	B	165	Jl. Raya Semarang -Demak Km.9, Sayung Demak Km.9, Sayung Demak 59563		Tanah Hak Pakai	Pembelian	21.468,64
6.	Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain (Paving)	B	168	Jl. Raya Semarang -Demak Km.9, Sayung Demak Km.9, Sayung Demak 59563		Tanah Hak Pakai	Pembelian	25.878,38
7.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	B	36	Jl. Raya Semarang -Demak Km.9, Sayung Demak Km.9, Sayung Demak 59563		Tanah Hak Pakai	Pembelian	188.546,00
8.	Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain (Paving)	B	207	Jl. Raya Semarang -Demak Km.9, Sayung Demak Km.9, Sayung Demak 59563		Tanah Hak Pakai	Pembelian	47.000,00
9.	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain (Pojo Dahak)	B	32	Jl. Raya Semarang -Demak Km.9, Sayung Demak Km.9, Sayung Demak 59563		Tanah Hak Pakai	Pembelian	94.564.000,00
10.	Pagar Permanen	B	20	Jl. Raya Semarang -Demak		Tanah Hak Pakai	Pembelian	27.300.000,00

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
				Km.9, Sayung Demak Km.9, Sayung Demak 59563				
11.	Pagar Permanen	B	24	Jl. Raya Semarang -Demak Km.9, Sayung Demak Km.9, Sayung Demak 59563		Tanah Hak Pakai	Pembelian	39.642.500,00
12.	Pagar Permanen	B	300	Jl. Raya Semarang -Demak Km.9, Sayung Demak Km.9, Sayung Demak 59563		Tanah Hak Pakai	Pembelian	99.782.000,00
Sayung II								
1	Pustu Kalisari	B	72	Desa Kalisari			Pembelian	269.130.590,00
2	Bangunan TPS	B	4,5	Jl. Onggorawe -mranggen Ds. Tambakroto rt 06/02, Sayung, Demak		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	6.000.000,00
3	Banguna Klinik/Puskesmas	B	1023	Jl. Onggorawe -Mranggen Ds. Tambakroto Rt 06/02, Sayung, Demak		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	1.806.856.000,00
4	Banguna Klinik/Puskesmas (Penambahan Ruang)	B	451,3	Jl. Onggorawe -Mranggen Ds. Tambakroto Rt 06/02, Sayung, Demak		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	1.485.213.820,00
5	Pustu Sayung	B	85	Desa Sayung		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	497.602.580,00
6	Jembatan	B	30,96	Jl. Onggorawe -Mranggen Ds. Tambakroto Rt 06/02, Sayung, Demak		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	20.200.000,00
7	Pagar Besi	B	39,45	Jl. Onggorawe -Mranggen Ds. Tambakroto Rt 06/02, Sayung, Demak		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	10.000.000,00
8	Pagar Permanen	B	12	Jl. Onggorawe -Mranggen Ds. Tambakroto Rt 06/02, Sayung, Demak		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	30.000.000,00
Wedung I								
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	364	Jln. Angin-angin no.8, Buko, wedung	364		Pembelian	929.924.250,00
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain (PUSTU RUWIT)	RB	72	Ruwit	72		Pembelian	318.150.394,75
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	B	120	Jln. Angin-angin no.8, Buko,	120		Pembelian	102.004.700,00

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
	(REHAB RI)			wedung				
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain (PKD TAMBAK SKLENTING)	KB	72	Dk. Tambak Sklenting	72		Pembelian	154.596.607,00
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain (PKD TAMBAK GOJOYO)	KB	72	Dk. Tambak Gojoyo	72		Pembelian	154.380.007,00
6	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	KB	21	Jln. Angin-angin no.8, Buko, wedung	21		Pembelian	26.500.000,00
7	Bangunan Gudang Terbuka Semi (Kanopi Parkiran) Permanen	B	62,5	Jln. Angin-angin no.8, Buko, wedung	62,5		Pembelian	7.219.125,00
8	Bangunan Klinik/Puskesmas (Gedung Rawat Jalan)	B	400	Jln. Angin-angin no.8, Buko, wedung	400		Pembelian	1.494.758.347,31
9	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain (PUSTU KENDUREN)	RB	72	Kenduren	72		Pembelian	318.150.394,75
10	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain (BANGUNAN PARKIR)	B	96,9	Jln. Angin-angin no.8, Buko, wedung	96,9		Pembelian	51.248.000,00
11	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain (RUMAH GENSET)	B	6	Jln. Angin-angin no.8, Buko, wedung	6		Pembelian	12.650.000,00
12	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain (RUMAH SAMPAH MEDIS)	B	6	Jln. Angin-angin no.8, Buko, wedung	6		Pembelian	17.400.000,00
13	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain (KANOPI PARKIR PENGUNJUNG)	KB	84	Jln. Angin-angin no.8, Buko, wedung	84		Pembelian	24.486.000,00
14	Taman Permanen (Taman Dan Paving)	B	39,5	Jln. Angin-angin no.8, Buko, wedung	39,5		Pembelian	25.400.000,00
15	Taman Permanen (Taman Rawat Inap)	B	14,82	Jln. Angin-angin no.8, Buko, wedung	14,82		Pembelian	19.800.000,00
16	Bangunan Gedung Tempat Kerja (GAPURA PUSKESMAS) Lainnya	B	10	Jln. Angin-angin no.8, Buko, wedung	10		Pembelian	47.700.000,00
17	Bangunan Gedung Tempat Kerja (DAPUR+TEMPAT CUCI) Lainnya	KB	55	Jln. Angin-angin no.8, Buko, wedung	55		Pembelian	87.380.429,92
18	Tugu Lainnya	B	1	Jln. Angin-angin no.8, Buko, wedung	1		Pembelian	5.965.037,08

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
Wedung II								
1	Puskesmas	B	2953	Jln Letnan Azhari No.04 Desa Mutih kulon Kec Wedung Kab.Demak	2853,25	Tanah hak lainnya	Pembelian	226.851.804.966
2	Pustu Babalan	B	87,5	Desa Babalan Kec.Wedung Kab.Demak	87,5	Tanah hak lainnya	Pembelian	307.669,29
3	Pustu Jetak	RB	117	Desa Jetak Kec.Wedung Kab.Demak	117	Tanah hak lainnya	Pembelian	134.100,00
4	Pustu Kedungmutih	B	73,5	Desa Kedungmutih Kec.Wedung Kab.Demak	73,5	Tanah hak lainnya	Pembelian	305.684,37
Wonosalam I								
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	108	Puskesmas Induk Wonosalam I - Jl. Demak-Purwodadi km 5,5 Pilangrejo, Wonosalam, Demak	108	Tanah Milik Pemda (Pemerintah Desa Pilangrejo)	Pembelian	342.399.000,00
2	Bangunan Klinik / Puskesmas	Baik	275	Puskesmas Induk Wonosalam I - Jl. Demak-Purwodadi km 5,5 Pilangrejo, Wonosalam, Demak	275	Tanah Milik Pemda (Pemerintah Desa Pilangrejo)	Pembelian	872.484.711,41
3	Bangunan Klinik / Puskesmas	Baik	300	Puskesmas Induk Wonosalam I - Jl. Demak-Purwodadi km 5,5 Pilangrejo, Wonosalam, Demak	300	Tanah Milik Pemda (Pemerintah Desa Pilangrejo)	Pembelian	1.476.224.151,00
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Baik	135	Pavling Halaman Depan Puskesmas - Jl. Demak-Purwodadi km 5,5 Pilangrejo, Wonosalam, Demak	135	Tanah Milik Pemda (Pemerintah Desa Pilangrejo)	Pembelian	20.000.000,00
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Baik	3	Bangunan Tempat Sampah - Jl. Demak-Purwodadi km 5,5 Pilangrejo, Wonosalam, Demak	3	Tanah Milik Pemda (Pemerintah Desa Pilangrejo)	Pembelian	3.000.000,00
6	Bangunan Gudang Lain-Lain	Baik	3	Bangunan Limbah TPS - Jl. Demak-Purwodadi km 5,5 Pilangrejo, Wonosalam, Demak	3	Tanah Milik Pemda (Pemerintah Desa Pilangrejo)	Pembelian	9.904.850,00
7	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	5	Puskesmas Induk Wonosalam I - Jl. Demak-Purwodadi km 5,5 Pilangrejo, Wonosalam, Demak	5	Tanah Milik Pemda (Pemerintah Desa Pilangrejo)	Pembelian	38.884.875,00
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	75	Puskesmas Pembantu Kunci	75	Tanah Milik Pemda (Pemerintah Desa	Pembelian	316.991.261,82

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
						Kuncir)		
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rusak Berat	140	Puskesmas Pembantu Mojodemak	140	Tanah Milik Pemda (Pemerintah Desa Mojodemak)	Pembelian	44.201.000,00
10	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Baik	74,25	BANGUNAN GARASI DEPAN GEDUNG INDUK - Jl. Demak-Purwodadi km 5,5 Pilangrejo, Wonosalam, Demak	74,25	Tanah Milik Pemda (Pemerintah Desa Mojodemak)	Pembelian	35.000.000,00
11	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Baik	76	BANGUNAN KANOPI HALAMAN BELAKANG PUSKESMAS - Jl. Demak-Purwodadi km 5,5 Pilangrejo, Wonosalam, Demak	76	Tanah Milik Pemda (Pemerintah Desa Mojodemak)	Pembelian	75.682.000,00
Labkes								
1	UPTD Labkes	B	644	Jl. Sultan Hadiwijaya No. 47 Demak	624	Hak Pakai	DAK Fisik 2021	

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah

Dinas Kesehatan Daerah Demak mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dengan fungsi Perumusan Kebijakan di bidang kesehatan; Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi di bidang kesehatan; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan; Pelaksanaan administrasi Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum Dinas kesehatan ikut berkontribusi dalam pencapaian peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya, yaitu Kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran, Pendidikan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, dan Standar hidup layak yang dihitung dari produk nasional bruto per kapita.

Angka Harapan Hidup terus meningkat dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022 angka harapan hidup sebesar 75,52 tahun. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 75,6 dan terus meningkat pada tahun 2024 menjadi 75,79. Hal ini menggambarkan bahwa bidang kesehatan ikut berkontribusi dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Demak.

a. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Daerah Demak berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Kesehatan pencapaian IKU, SPM, dan SDGs yang disajikan pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	SPM	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	0,76	-	-	0,60	0,68	0,72	0,76	0,82	0,752	0,848	0,930	NA	NA	117,50	124,71	129,17	NA	NA
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	%	100	-	-	60	60	83	100	100	100	100	100	NA	NA	166,67	166,67	120,48	NA	NA
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	SPM	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	-	100	100	100	100	100	99,81	100	100	NA	NA	99,81	100,00	100,00	NA	NA
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	SPM	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA
15	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	-	-	65	50	55	60	65	70	89,87	96,4	99,4	NA	NA	179,74	175,27	165,67	NA	NA
16	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA
17	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	%	-	-	99,83	99,66	99,66	99,74	99,83	99,1	99,77	106,36	106,46	NA	NA	100,11	106,72	106,74	NA	NA
18	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ palita	%	-	-	11,86	22,24	18,38	15,12	11,86	8,6	16,2	9,5	10	NA	NA	127,16	148,31	133,86	NA	NA
19	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	%	-	-	3,00	3,75	3,5	3,25	3,00	2,75	2,20	2,47	2,74	NA	NA	141,33	129,43	115,69	NA	NA

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	SPM	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
20	Prevalensi malnutri (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe	%	-	-	0,8	0,90	0,9	0,8	0,8	0,7	0,029	0,024	0,046	NA	NA	196,78	197,33	194,25	NA	NA
21	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	-	-	4,44	4,74	4,64	4,54	4,44	4,34	3,28	4,40	4,64	NA	NA	130,80	105,17	97,80	NA	NA
22	Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%	-	-	64,17	62,28	62,9	63,53	64,17	64,81	74,99	74,94	92,22	NA	NA	120,41	119,14	145,16	NA	NA
23	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	-	-	96	99	98	97	96	95	67,30	63,88	48,50	NA	NA	132,02	134,82	150,00	NA	NA
24	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan di tolong oleh tenaga kesehatan terlatih	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA
25	Presentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA
26	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	-	-	5,7	5,8	5,8	5,7	5,7	5,6	4,8	5,6	8,9	NA	NA	117,24	103,45	43,86	NA	NA
27	Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	-	-	3,2	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	2,43	3,2	6,5	NA	NA	126,36	103,03	-3,12	NA	NA

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	SPM	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
28	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	-	-	4,8	4,9	4,9	4,8	4,8	4,7	3,7	3,41	7,46	NA	NA	124,49	130,41	44,58	NA	NA
29	Cakupan UCI desa	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA
30	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	-	-	127	120	123	125	127	130	148	143,6	161,5	NA	NA	123,33	116,77	129,23	NA	NA
31	Kejadian Malaria per 1000 orang	Per 1.000 Penduduk Berisiko	-	-	0,017	0,015	0,016	0,016	0,017	0,017	0,01	0,01	0,015	NA	NA	66,67	62,50	93,75	NA	NA
32	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Orang	-	-	34	40	39	35	34	31	20	32	39	NA	NA	150,00	117,95	88,57	NA	NA
33	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 Tahun	%	-	-	20,44	23,84	22,65	21,52	20,44	19,42	NA	4,06	3,60	NA	NA	NA	182,08	183,27	NA	NA
34	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	-	-	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA
35	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun	%	-	-	PM	PM	PM	PM	PM	PM	NA	22,5	22,5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
36	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	-	-	100	100	100	100	100	100	88,75	97,22	99,4	NA	NA	88,75	97,22	99,40	NA	NA
37	Persentase merokok pada penduduk ≥15 tahun	%	-	-	20,44	23,84	22,65	21,52	20,44	19,42	NA	22,54	16,66	NA	NA	NA	100,49	122,58	NA	NA
38	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	SPM	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
39	Kepadatan dan Distribusi tenaga Kesehatan	Per 100.000 Penduduk	-	-	16,7	16,21	16,37	16,53	16,7	16,87	3,64	2,54	3,017	NA	NA	22,46	15,52	18,25	NA	NA
40	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa	-	-	180	165	170	175	180	185	249	249	249	NA	NA	150,91	146,47	142,29	NA	NA
41	Jumlah kasus malaria positif pada periode tertentu	Kasus baru per 100.000 penduduk	-	-	PM	PM	PM	PM	PM	PM	NA	34	19	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
42	Jumlah kasus hipertensi	Kasus	-	-	313601	313601	313601	313601	313601	313601	313156	309281	309979	NA	NA	99,86	98,62	98,85	NA	NA
43	Jumlah tenaga kesehatan (9 jenis tenaga strategis di Puskesmas):	Orang	-	-	PM			PM	PM	PM			3508	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	a. Dokter												461	NA	NA					
	b. Dokter Gigi												101	NA	NA					
	c. Tenaga Kefarmasian												476	NA	NA					
	d. Perawat												1271	NA	NA					
	e. Bidan												884	NA	NA					
	f. Nutrisionis												77	NA	NA					
	g. Sanitarian												38	NA	NA					
	h. Promosi Kesehatan												31	NA	NA					
	i. Ahli Teknik Laboratorium Medik (ATLM)												169	NA	NA					

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	SPM	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.		-	-	PM			PM	PM	PM			3410	NA	NA	-	-	-	NA	NA
	a. Apoteker												334	NA	NA					
	b. Bidan												884	NA	NA					
	c. Dokter Gigi												101	NA	NA					
	d. Dokter Spesialis												169	NA	NA					
	e. Dokter Umum												461	NA	NA					
	f. Perawat												1271	NA	NA					
	g. Tenaga Gizi												77	NA	NA					
	h. Tenaga Kesehatan Lingkungan												38	NA	NA					
	i. Tenaga Kesehatan Masyarakat												75	NA	NA					

Dari tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja masing-masing indikator sasaran tergambar pada uraian berikut :

a. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator SPM

Pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) terdapat 14 Indikator. 12 Indikator diantaranya termasuk ke dalam Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan secara keseluruhan telah mencapai target dan terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Pada Tahun 2022 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan mencapai 0,752 dari target sebesar 0,640. Kemudian meningkat sebesar 0,096 menjadi 0,848 pada tahun 2023 dengan target sebesar 0,680 dan pada tahun 2024 mencapai 0,930 dari target sebesar 0,720. Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten yang Terakreditasi hingga tahun 2024 telah terakreditasi seluruhnya, keseluruhan telah terakreditasi Paripurna.

12 Indikator Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang juga menjadi Indikator SPM, pada tahun 2024 telah mencapai 100 persen. Keberhasilan capaian SPM ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Memaksimalkan Skrining faktor resiko pada ibu hamil oleh petugas kesehatan.
2. Sosialisasi dan advokasi program Penyakit Tidak Menular (PTM), serta adanya sistem pelaporan yang terintegrasi untuk pelaporan PTM.
3. Fasilitas Kesehatan meningkatkan Skrining di masyarakat dengan melibatkan kader dalam skrining kesehatan jiwa. Serta, melakukan pendataan pasien ODGJ.
4. Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada keluarga dan lingkungan keluarga dari pasien ODGJ.
5. Memaksimalkan Pemanfaatan posyandu pada usia lanjut.

6. Mengoptimalkan koordinasi dengan Puskesmas, Rumah sakit, Klinik, dan Praktik Mandiri Bidan dalam memberikan layanan SHK.
 7. Peningkatan kompetensi bidan melalui pelatihan, pendidikan formal, seminar, dan workshop.
- b. Capaian Indikator SDG's

Capaian SDG's pada Tahun 2024 sebagian besar telah mencapai target. Beberapa Indikator tidak dapat disajikan datanya karena beberapa indikator SDG's pada tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan Indikator. Selain itu terdapat juga beberapa indikator yang tidak dapat disajikan targetnya sehingga dalam tabel target disajikan dengan PM. Pada tahun 2024 terdapat beberapa indikator yang belum tercapai seperti Prevalensi Anemia pada ibu hamil, Jumlah Kasus Infeksi baru Hepatitis B pada Periode Waktu Tertentu, Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 Penduduk, dan Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi mengalami perubahan target pada tahun 2024 yang semula pada Renstra AKI memiliki target sebesar 97/100.000KLH berubah menjadi 63,60/100.000KLH dan AKB yang semula pada Renstra memiliki target sebesar 4,8/1.000KLH kemudian berubah menjadi 3,41/1.000KLH pada tahun 2024. Perubahan Target ini didasarkan karena capaian kinerja pada tahun 2023 telah melampaui target yaitu AKI sebesar 63,60/100.000KLH dan AKB 3,41/1.000KLH.

Angka Kematian Ibu (AKI) pada Tahun 2024 mencapai angka 48,5/100.000KLH dari target AKI sebesar 63,6/100.000KLH atau capaian sebesar 123,72% dengan kasus sebanyak 8 kasus. Indikator ini merupakan indikator negatif sehingga apabila angka capaiannya lebih rendah dari angka

target maka semakin baik capaiannya. Masih adanya permasalahan dalam Angka Kematian Ibu (AKI) disebabkan karena adanya gangguan Hipertensi (5 kasus), gangguan Kelainan Jantung (1 Kasus), dan lain-lain (2 Kasus).

Angka Kematian Bayi (AKB) pada Tahun 2024 memiliki kasus yang cukup tinggi. Capaian kinerja menunjukkan angka sebesar 7,46/1.000KLH dari target 3,41/1.000KLH dengan persentase sebesar -18,73%. Capaian pada tahun 2024 untuk kasus kematian bayi masuk kedalam kategori capaian sangat rendah. Pada tahun 2024 kasus kematian bayi sebanyak 123 kasus. Tingginya kasus kematian bayi ini disebabkan karena adanya Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia, Sepsis, Kelainan Kongenital, Pneumonia, Kelainan Saluran Cerna. Penyebab terbanyak kasus kematian bayi adalah BBLR dan Asfiksia. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) disebabkan karena kelahiran prematur, Kondisi kesehatan ibu selama kehamilan (Preeklamsia dan Hipertensi, Infeksi seperti HIV, Toxoplasmosis, dan Malnutrisi), Usia ibu hamil, ataupun kondisi lainnya seperti kehamilan kembar. Sedangkan Asfiksia dapat disebabkan karena masalah pada saat persalinan seperti adanya tali pusat yang terlepas, kekurangan pasokan oksigen, pendarahan hebat pada ibu.

Selain AKI dan AKB yang mengalami perubahan target, indikator Prevalensi Stunting juga mengalami perubahan target. Pada tahun 2024 di renstra semula memiliki target sebesar 15,12% pada tahun 2024 mengalami perubahan target menjadi 9,31% dengan capaian 10%. Perubahan ini didasari karena capaian stunting pada tahun 2023 telah melampaui target dengan capaian sebesar 9,5%. Capaian Stunting pada tahun 2024 tidak mencapai target karena adanya perubahan penghitungan, dalam penghitungan tersebut bukan hanya menghitung prevalensi stunting saja tetapi juga menambahkan

severely stunting kedalam capaian prevalensi stunting. Pada tahun 2024 capaian *severely* stunting sebesar 1,1% dan prevalensi stunting sebesar 8,9% sehingga total capaian ini sebesar 10%.

Indikator SDG's Jumlah Tenaga Kesehatan (9 Jenis Tenaga Strategis di Puskesmas). Pada Tahun 2024 pemenuhan 9 Jenis Tenaga Strategis di puskesmas ini telah mencapai 92,59% capaian ini meningkat dari tahun 2023 yang baru mencapai 85,19%. Pada tahun 2024 masih terdapat 4 Puskesmas yang belum memenuhi 9 jenis tenaga Kesehatan yaitu puskesmas Karanganyar I dan Wedung I dengan belum terpenuhinya tenaga Sanitasi Lingkungan. Puskesmas Karanganyar II dan Mijen I Belum terpenuhi untuk Tenaga Promosi Kesehatan.

Pada tahun 2024 Tenaga Medis di kabupaten Demak mencapai 730 orang dengan 461 dokter umum, 162 dokter spesialis, dan 101 dokter gigi. Tenaga Psikologi Klinis sejumlah 2 orang. Tenaga Keperawatan sebanyak 1271 orang dan tenaga bidan sebanyak 884 orang. Tenaga Kefarmasian sebanyak 476 orang dengan rincian tenaga apoteker sebanyak 334 dan tenaga teknik kefarmasian sebanyak 142 orang. Tenaga gizi sebanyak 77 Orang, Tenaga Keterampilan Fisik sebanyak 41 orang dengan rincian fisioterapis sebanyak 33 orang, Okupasi terapis sejumlah 4 orang, terapis wicara sejumlah 3 orang, akupuntur sejumlah 1 orang. Tenaga Keteknisian Medis sejumlah 144 orang, dengan rincian tenaga perekam medis dan informasi kesehatan sejumlah 71 orang, teknisi pelayanan darah sejumlah 2 orang, refraksionis optisien/optometris sejumlah 4 orang, penata anestesi sejumlah 13 orang, terapis gigi dan mulut sejumlah 54 orang. Tenaga Teknik Biomedika sejumlah 225 orang, dengan rincian tenaga radiografer sejumlah 44 orang, elektromedis sejumlah 11 orang, ahli teknologi laboratorium medis sejumlah 169 orang.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Daerah

Anggaran dan Realisasi pendanaan pada Dinas Kesehatan Daerah mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi dan peningkatan anggaran. Pada tahun 2024 Dinas Kesehatan Daerah mendapatkan anggaran dari insentif fiskal. Anggaran di Dinas Kesehatan Daerah mencakup anggaran 27 Puskesmas, 2 Rumah Sakit Umum Daerah, dan 1 Laboratorium Kesehatan Daerah. Rincian anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan tersaji pada tabel 2.6. berikut :

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)*	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	214.791.023.500	217.709.023.500	215.494.023.500	215.624.023.500	215.789.023.500	298.921.087.398	284.278.086.492	310.255.431.725	300.816.017.160	294.233.663.710	139,17	130,58	143,97	139,51	136,35	0,00	0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	19.010.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000	-	190,10	100,00	100,00	200,00	0,00	0,13
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	19.010.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000	-	190,10	100,00	100,00	200,00	0,00	0,13
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	48.000.000	284.800.000	137.687.700	430.000.000	551.170.000	160,00	813,71	393,39	1228,57	1574,77	0,04	1,71
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	48.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	175.770.000	160,00	83,33	100,00	100,00	585,90	0,00	1,14
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	259.800.000	107.687.700	400.000.000	355.000.000	-	5196,00	2153,75	8000,00	7100,00	0,00	0,50
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.415.800	569.415.800	580.415.800	660.415.800	665.415.800	917.872.600	706.011.500	718.158.300	470.291.300	624.150.000	256,81	123,99	123,73	71,21	93,80	0,19	-0,06
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	24.953.700	10.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000	249,54	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,10
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.760.200	166.760.200	166.760.200	171.760.200	171.760.200	168.555.700	213.788.200	110.607.200	100.957.200	124.189.900	114,85	128,20	66,33	58,78	72,30	0,04	-0,02
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	19.000.000	39.570.600	33.862.600	24.060.600	46.507.600	211,11	359,73	282,19	200,51	387,56	0,08	0,40
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.044.400	64.044.400	64.044.400	64.044.400	64.044.400	170.567.000	-	66.077.300	66.077.300	46.081.300	230,36	-	103,17	103,17	71,95	-0,03	-0,33

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)*	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.781.200	43.781.200	43.781.200	53.781.200	53.781.200	89.716.200	43.781.200	43.781.200	43.781.200	63.781.200	204,92	100,00	100,00	81,41	118,59	0,06	-0,01
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	11.760.000	100,00	100,00	100,00	100,00	98,00	0,02	0,02
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	15.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	-	22.300.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	-	148,67	50,00	66,67	66,67	0,21	0,11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.830.000	236.830.000	236.830.000	286.830.000	286.830.000	428.080.000	354.571.500	406.830.000	168.415.000	236.830.000	753,26	149,72	171,78	58,72	82,57	0,84	-0,05
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	6.000.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000	30.000.000	100,00	100,00	166,67	125,00	120,00	0,44	0,59
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.908.200	3.055.908.200	760.908.200	810.908.200	910.908.200	761.499.600	2.722.802.300	11.764.170.500	476.508.200	1.384.254.000	126,72	89,10	1546,07	58,76	151,96	0,88	1,71
Pengadaan kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	30.213.000	-	-	-	-	30.213.000	-	10.214.522.500	-	-	100,00	-	-	-	-	-0,25	-0,50
Pengadaan Mebel	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	193.674.600	170.303.500	140.000.000	25.000.000	185.000.000	-	681,21	560,00	100,00	740,00	0,00	1,32
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	557.234.600	617.234.600	642.234.600	642.234.600	692.234.600	537.612.000	835.498.800	592.646.700	357.834.600	973.100.000	96,48	135,36	92,28	55,72	140,57	0,06	0,40
Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	-	2.320.000.000	-	-	-	-	1.642.000.000	-	-	-	-	70,78	-	-	-	-0,25	-0,25
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.460.600	68.673.600	68.673.600	118.673.600	168.673.600	-	50.000.000	90.888.800	68.673.600	196.154.000	-	72,81	132,35	57,87	116,29	0,29	0,61
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	726.112.500	25.000.000	30.000.000	-	100,00	2904,45	100,00	120,00	0,00	6,82

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)*	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.823.691.300	1.848.691.300	1.894.691.300	1.894.691.300	1.944.691.300	1.827.951.300	2.776.200.000	2.607.392.000	2.719.491.900	3.290.191.900	100,23	150,17	137,62	143,53	169,19	0,02	0,18
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	6.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	130,00	0,06	0,14
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.791.691.300	1.816.691.300	1.841.691.300	1.841.691.300	1.891.691.300	1.795.951.300	2.738.600.000	2.547.792.000	2.662.891.900	2.764.091.900	100,24	150,75	138,34	144,59	146,12	0,01	0,13
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	28.000.000	28.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	28.000.000	33.600.000	54.600.000	51.600.000	519.600.000	100,00	120,00	113,75	107,50	1082,50	0,18	2,46
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.990.000	335.990.000	358.990.000	358.990.000	368.990.000	739.760.000	613.900.000	530.840.600	393.990.000	482.790.000	591,86	182,71	147,87	109,75	130,84	0,45	-0,08
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	20.000.000	26.500.000	25.000.000	5.500.000	-	100,00	106,00	100,00	22,00	0,06	-0,13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.720.000	108.720.000	123.720.000	123.720.000	133.720.000	278.760.000	156.060.000	138.231.600	108.720.000	119.520.000	354,12	143,54	111,73	87,88	89,38	0,15	-0,17
Pemeliharaan Mebel	1.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	7.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	150,00	0,63	0,75
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.270.000	50.270.000	50.270.000	50.270.000	50.270.000	-	50.640.000	70.270.000	50.270.000	85.270.000	-	100,74	139,79	100,00	169,62	0,00	0,20
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	440.000.000	85.200.000	185.839.000	100.000.000	140.000.000	2200	170,40	371,68	200,00	280,00	0,38	0,08

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)*	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	20.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,69
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	225.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.000	-	750,00	100,00	100,00	166,67	0,00	-0,05
Peningkatan Pelayanan BLUD	211.854.018.200	211.854.018.200	211.854.018.200	211.854.018.200	211.854.018.200	294.626.003.898	277.155.362.692	294.487.182.625	296.315.735.760	287.881.107.810	139,07	130,82	139,00	139,87	135,89	0,00	0,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	211.854.018.200	211.854.018.200	211.854.018.200	211.854.018.200	211.854.018.200	294.626.003.898	277.155.362.692	294.487.182.625	296.315.735.760	287.881.107.810	139,07	130,82	139,00	139,87	135,89	0,00	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	124.974.705.901	125.806.434.403	128.855.705.871	130.351.361.428	131.295.590.366	117.944.384.168	121.180.963.200	136.531.965.900	148.161.436.500	148.376.144.500	94,37	96,32	105,96	113,66	113,01	0,01	0,06
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000	135.000.000	190.000.000	290.000.000	240.000.000	235.841.800	160.000.000	348.350.000	374.492.000	450.000.000	524,09	118,52	183,34	129,14	187,50	0,69	0,28
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	45.000.000	75.000.000	125.000.000	100.000.000	15.000.000	45.000.000	200.000.000	263.305.000	300.000.000	100,00	100,00	266,67	210,64	300,00	0,78	1,48
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	100,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,06
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	100,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	50.000.000	75.000.000	125.000.000	100.000.000	-	75.000.000	98.350.000	61.187.000	100.000.000	-	150,00	131,13	48,95	100,00	0,24	0,14
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	-	-	-	-	220.841.800	-	-	-	-	736,14	-	-	-	-	0,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	124.929.705.901	125.671.434.403	128.665.705.871	130.061.361.428	131.055.590.366	117.708.542.368	121.020.963.200	136.183.615.900	147.786.944.500	147.926.144.500	94,22	96,30	105,84	113,63	112,87	0,01	0,06

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)*	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	115.049.781.901	115.675.009.403	118.644.280.871	120.189.936.428	121.184.165.366	105.775.893.368	111.688.191.000	125.030.561.900	140.443.482.000	140.443.482.000	91,94	96,55	105,38	116,85	115,89	0,01	0,07
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.801.425.000	9.756.425.000	9.756.425.000	9.756.425.000	9.756.425.000	11.569.150.000	9.045.082.200	10.816.404.000	7.006.812.500	7.146.012.500	118,04	92,71	110,86	71,82	73,24	0,00	-0,09
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	35.000.000	190.000.000	190.000.000	40.000.000	40.000.000	160.000.000	-	-	-	-	457,14	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43.499.000	50.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	203.499.000	287.690.000	336.650.000	336.650.000	336.650.000	467,82	575,38	448,87	448,87	448,87	0,16	0,15
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	114.177.266.590	103.803.657.360	111.475.796.302	112.583.871.860	118.883.871.860	132.662.189.759	128.283.149.778	122.446.109.525	130.939.981.550	140.727.498.308	116,19	123,58	109,84	116,30	118,37	0,01	0,02
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.067.753.050	19.068.826.010	26.740.961.452	21.371.726.010	26.621.726.010	25.956.256.122	32.923.130.514	21.555.114.915	37.165.200.492	32.262.326.050	129,34	172,65	80,61	173,90	121,19	0,10	0,13
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.293.000.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pengembangan Puskesmas	-	1.948.000.000	9.119.235.442	2.250.000.000	5.750.000.000	-	2.040.000.000	536.379.400	10.800.000.000	2.511.740.000	-	104,72	5,88	480,00	43,68	1,12	4,41
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	-	-	-	-	1.750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.487.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000	2.487.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-0,10	-0,25
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	150.000.000	-	1.436.755.000	18.516.196.000	1.600.000.000	30,00	-	287,35	3703,24	320,00	0,00	2,49
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.164.027.040	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	4.286.330.040	500.000.000	-	-	-	83,00	12,50	-	-	0,00	-0,06	-0,47

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)*	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	254.100.000	254.100.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000	1.177.697.000	252.000.000	-	-	-	463,48	99,17	-	-	0,00	0,00	-0,45
Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas pelayanan Kesehatan	4.366.726.010	4.366.726.010	4.366.726.010	4.366.726.010	4.366.726.010	10.145.826.010	27.358.036.814	3.662.918.625	-	8.725.000.000	232,34	626,51	83,88	-	199,81	0,00	-0,04
Pengadaan Obat, Vaksin	6.795.900.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	6.222.503.072	2.159.817.700	-	-	-	91,56	36,00	-	-	-	-0,03	-0,41
Pengadaan Bahan Habis Pakai	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1.486.900.000	613.276.000	-	-	-	297,38	122,66	-	-	-	0,00	-0,40
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	58.131.000	-	75.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-0,25
Pengembangan Rumah Sakit	-	-	-	-	-	-	-	8.583.317.000	-	5.449.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-0,25
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	6.813.095.790	7.533.179.492	7.177.761.050	-	-	-	-	-	0,00	0,01
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	350.000.000	315.825.000	315.825.000	-	-	-	-	-	0,00	-0,02
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	114.518.100	-	115.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-0,25
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92.594.037.540	83.969.355.350	83.969.358.850	90.037.145.850	91.087.145.850	105.440.627.437	94.593.241.964	100.176.344.610	93.311.310.950	107.005.904.150	113,87	112,65	119,30	103,64	117,48	0,00	0,01

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)*	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.563.553.300	2.699.795.800	2.699.795.800	2.699.795.800	2.699.795.800	2.182.236.150	2.531.929.200	1.317.742.000	2.471.426.000	2.811.961.000	85,13	93,78	48,81	91,54	104,15	0,01	0,17
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.283.229.900	1.323.158.900	1.323.158.900	1.323.158.900	1.323.158.900	1.290.053.125	1.100.383.000	662.754.000	200.000.000	127.860.000	100,53	83,16	50,09	15,12	9,66	0,01	-0,40
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	700.809.700	1.191.904.700	1.191.904.700	1.191.904.700	1.191.904.700	789.394.700	1.385.991.100	372.190.160	294.981.600	1.109.563.500	112,64	116,28	31,23	24,75	93,09	0,18	0,64
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.877.267.800	1.927.990.400	1.927.990.400	1.927.990.400	1.927.990.400	1.900.087.400	1.449.172.000	210.242.000	140.000.000	44.776.000	101,22	75,16	10,90	7,26	2,32	0,01	-0,53
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.485.688.000	1.488.688.000	1.488.691.500	1.493.001.500	1.493.001.500	1.508.320.275	1.445.993.000	1.476.510.000	1.252.946.000	1.282.611.000	101,52	97,13	99,18	83,92	85,91	0,00	-0,04
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3.511.367.690	3.500.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	3.724.397.675	4.729.569.500	753.378.100	753.378.100	5.051.604.000	106,07	135,13	21,53	18,83	126,29	0,03	1,28
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	601.056.500	598.472.500	598.472.500	598.472.500	598.472.500	585.797.600	457.506.300	112.000.000	108.100.000	37.880.000	97,46	76,45	18,71	18,06	6,33	0,00	-0,41
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	145.210.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	155.110.000	200.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	106,82	100,00	25,00	20,00	20,00	0,16	-0,12
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	41.104.300	71.300.000	71.300.000	106.300.000	106.300.000	54.604.300	72.200.000	637.240.000	85.000.000	550.220.400	132,84	101,26	893,74	79,96	517,61	0,31	3,19
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	293.802.100	295.780.000	295.780.000	295.780.000	295.780.000	299.407.100	260.280.000	150.000.000	348.550.000	348.550.000	101,91	88,00	50,71	117,84	117,84	0,00	0,19
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.087.532.500	1.503.951.000	1.503.951.000	1.623.951.000	1.623.951.000	2.083.756.275	1.722.531.000	2.859.627.000	1.311.790.000	1.899.351.000	99,82	114,53	190,14	80,78	116,96	-0,05	0,10

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)*	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	782.063.000	745.750.000	745.750.000	745.750.000	745.750.000	790.013.000	720.938.100	907.450.000	458.000.000	1.095.750.000	101,02	96,67	121,68	61,41	146,93	-0,01	0,27
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	7.704.740.900	6.327.819.900	6.327.819.900	6.327.819.900	6.327.819.900	4.306.839.450	960.308.000	550.000.000	350.000.000	400.000.000	55,90	15,18	8,69	5,53	6,32	-0,04	-0,36
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6.624.521.600	4.872.160.900	4.872.160.900	5.372.160.900	5.372.160.900	6.076.230.900	8.534.999.230	9.789.428.200	8.317.955.200	5.880.970.000	91,72	175,18	200,93	154,83	109,47	-0,04	0,03
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.012.921.300	1.025.554.200	1.025.554.200	1.045.554.200	1.045.554.200	1.086.038.500	479.820.000	50.032.000	252.584.600	252.552.600	107,22	46,79	4,88	24,16	24,15	0,01	0,65
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.119.809.500	1.117.940.400	1.117.940.400	4.067.940.400	4.067.940.400	1.315.398.000	1.384.421.400	1.512.249.900	455.279.900	834.960.000	117,47	123,84	135,27	11,19	20,53	0,66	0,07
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3.265.724.150	3.116.932.750	3.116.932.750	3.216.932.750	3.216.932.750	5.848.675.925	2.043.359.300	567.284.000	399.458.400	489.034.800	179,09	65,56	18,20	12,42	15,20	0,00	-0,36
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	15.000.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000	50.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	0,42	0,17
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.625.000	167.625.000	167.625.000	167.625.000	167.625.000	9.675.000	50.000.000	922.848.000	542.172.000	551.932.000	54,89	29,83	550,54	323,44	329,27	2,13	5,31
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	-	-	-	-	-	15.975.400	85.730.000	-	-	-	-	-	0,00	1,09
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	199.650.000	224.650.000	224.650.000	234.650.000	234.650.000	252.115.000	212.570.000	30.600.400	85.730.000	15.975.400	126,28	94,62	13,62	36,54	6,81	0,04	-0,01
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	356.045.300	400.000.000	400.000.000	500.000.000	500.000.000	1.494.975.300	153.165.000	-	-	4.754.238.000	419,88	38,29	-	-	-	0,03	-0,47

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)*	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9.326.842.250	8.625.709.850	8.625.709.850	8.625.709.850	8.625.709.850	6.405.854.290	4.964.230.370	6.511.635.400	3.644.238.000	65.083.083.450	68,68	57,55	75,49	42,25	754,52	-0,02	4,13
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	35.774.258.900	35.774.258.900	35.774.258.900	35.774.258.900	35.774.258.900	42.485.939.072	51.504.310.700	58.151.143.050	62.671.383.350	70.000.000	118,76	143,97	162,55	175,19	0,20	0,00	-0,14
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	30.000.000	30.000.000	70.000.000	70.000.000	-	30.000.000	46.653.000	52.000.000	375.000.000	-	100,00	155,51	74,29	535,71	0,33	1,72
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.650.826.000	530.826.000	530.826.000	580.000.000	580.000.000	2.650.826.000	90.133.000	302.251.400	329.251.400	4.558.881.000	100,00	16,98	56,94	56,77	786,01	-0,18	3,58
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.478.532.000	1.478.532.000	1.478.532.000	1.478.532.000	1.478.532.000	1.478.532.000	1.834.081.000	-	-	-	100,00	124,05	-	-	0,00	0,00	-0,19
Operasional Pelayanan Puskesmas	764.748.650	764.748.650	764.748.650	764.748.650	764.748.650	3.040.212.800	3.706.452.000	6.324.795.000	4.558.881.000	4.558.881.000	397,54	484,66	827,04	596,13	596,13	0,00	0,16
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.409.410.200	3.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	11.698.170.200	232.230.000	930.955.000	519.981.000	665.889.000	182,52	7,74	31,03	13,00	13,32	0,01	0,47
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	169.158.000	169.158.000	169.158.000	500.000.000	500.000.000	1.532.507.400	398.771.000	354.719.000	314.719.000	320.000.000	905,96	235,74	209,70	62,94	64,00	0,49	-0,24
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	73.838.000	33.150.000	33.150.000	-	100,00	246,13	110,50	110,50	0,00	0,23
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	71.539.000	71.539.000	71.539.000	265.000.000	315.000.000	71.539.000	64.039.000	56.539.000	56.539.000	60.000.000	100,00	89,52	79,03	21,34	19,05	0,72	-0,04
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	260.000.000	260.000.000	260.000.000	300.000.000	300.000.000	308.921.000	1.357.940.264	458.242.000	358.242.000	400.000.000	118,82	522,28	176,25	119,41	133,33	0,04	0,66
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar	-	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	-	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Program/ Kegiatan/ Subgiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)*	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Melalui Pendekatan Keluarga																	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	48.810.000	237.800.000	86.750.000	86.750.000	-	97,62	475,60	173,50	173,50	0,00	0,81
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	152.975.000	57.200.000	57.200.000	-	100,00	305,95	114,40	114,40	0,00	0,36
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	40.108.500	40.108.500	40.108.500	40.108.500	-	92.108.500	68.160.000	51.800.000	71.800.000	-	229,65	169,94	129,15	179,01	0,00	-0,03
Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000	105.000.000	70.000.000	85.525.000	-	100,00	70,00	46,67	57,02	0,00	-0,10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	-	-	-	-	571.524.000	622.459.000	627.969.000	-	-	-	-	-	0,00	0,02
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	-	-	-	-	2.873.539.000	1.157.560.000	840.306.000	-	-	-	-	-	0,00	-0,22
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	301.500.000	383.620.000	-	-	-	-	-	0,00	0,07
Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	507.330.000	957.330.000	-	-	-	-	-	0,00	0,22
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.351.000.000	601.000.000	601.000.000	750.000.000	750.000.000	1.151.000.000	502.686.300	345.122.000	254.268.108	524.268.108	85,20	83,64	57,42	33,90	69,90	-0,08	-0,02
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	225.000.000	225.000.000	225.000.000	250.000.000	250.000.000	225.000.000	225.000.000	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	0,00	-0,25
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	126.000.000	126.000.000	126.000.000	200.000.000	200.000.000	126.000.000	123.862.000	345.122.000	254.268.108	524.268.108	100,00	98,30	273,91	127,13	262,13	0,15	0,64
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1.000.000.000	250.000.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000	800.000.000	153.824.300	-	-	-	80,00	61,53	-	-	-	-0,19	-0,45

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)*	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	164.476.000	164.476.000	164.476.000	425.000.000	425.000.000	114.306.200	264.091.000	369.528.000	209.202.000	935.000.000	69,50	160,57	224,67	49,22	220,00	0,40	1,19
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.000.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	128.091.000	128.091.000	128.091.000	350.000.000	350.000.000	77.921.200	128.091.000	233.528.000	101.091.000	130.000.000	60,83	100,00	182,31	28,88	37,14	0,43	0,30
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	36.385.000	36.385.000	36.385.000	75.000.000	75.000.000	36.385.000	136.000.000	136.000.000	108.111.000	145.000.000	100,00	373,78	373,78	144,15	193,33	0,27	0,72
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	913.880.000	1.628.880.000	1.628.880.000	2.028.880.000	2.028.880.000	7.342.760.000	2.238.430.000	2.285.811.000	1.591.791.000	2.048.880.000	803,47	137,42	140,33	78,46	100,99	0,26	-0,17
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	25.000.000	65.000.000	65.000.000	175.000.000	175.000.000	25.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	175.000.000	100,00	100,00	100,00	37,14	100,00	0,82	0,82
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	15.000.000	40.000.000	40.000.000	75.000.000	75.000.000	15.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	75.000.000	100,00	100,00	100,00	53,33	100,00	0,64	0,64
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10.000.000	25.000.000	25.000.000	100.000.000	100.000.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100.000.000	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00	1,13	1,13

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)*	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	728.880.000	1.298.880. 000	1.298.880. 000	1.338.880. 000	1.338.880. 000	762.760.000	500.000.000	590.133.000	352.624.000	1.338.880. 000	104,65	38,49	45,43	26,34	100,00	0,20	0,56
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	41.880.000	76.880.000	76.880.000	96.880.000	96.880.000	41.880.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	96.880.000	100,00	65,04	65,04	51,61	100,00	0,27	0,28
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	687.000.000	722.000.000	722.000.000	742.000.000	742.000.000	705.880.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	742.000.000	102,75	6,93	6,93	6,74	100,00	0,02	3,23
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	15.000.000	400.000.000	490.133.000	252.624.000	500.000.000	-	80,00	98,03	50,52	100,00	0,00	6,60
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000	265.000.000	265.000.000	515.000.000	515.000.000	6.555.000. 000	1.673.430. 000	1.630.678. 000	1.174.167. 000	535.000.000	4096,88	631,48	615,35	227,99	103,88	0,40	-0,40
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000	265.000.000	265.000.000	515.000.000	515.000.000	6.555.000. 000	1.673.430. 000	1.630.678. 000	1.174.167. 000	535.000.000	4096,88	631,48	615,35	227,99	103,88	0,40	-0,40
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	528.094.000	320.063.000	320.063.000	400.000.000	400.000.000	528.094.000	468.140.000	775.194.000	632.302.000	776.000.000	100,00	146,26	242,20	158,08	194,00	-0,04	0,15

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)*	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	120.063.000	120.063.000	120.063.000	150.000.000	150.000.000	120.063.000	81.575.100	123.793.000	60.063.000	124.000.000	100,00	67,94	103,11	40,04	82,67	0,06	0,19
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	120.063.000	120.063.000	120.063.000	150.000.000	150.000.000	120.063.000	81.575.100	123.793.000	60.063.000	124.000.000	100,00	67,94	103,11	40,04	82,67	0,06	0,19
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	408.031.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	408.031.000	386.564.900	651.401.000	572.239.000	652.000.000	100,00	193,28	325,70	228,90	260,80	-0,06	0,16
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	408.031.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	408.031.000	386.564.900	651.401.000	572.239.000	652.000.000	100,00	193,28	325,70	228,90	260,80	-0,06	0,16

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)*	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.873.434.650	1.873.434.650	1.873.434.650	2.182.647.050	2.182.647.050	1.695.485.125	1.703.741.200	1.955.391.000	1.036.965.100	1.097.841.400	90,50	90,94	104,37	47,51	50,30	0,04	-0,06
Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/ kota	-	-	-	-	-	-	-	93.700.000	411.700.100	440.750.000	-	-	-	-	-	0,00	0,87
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	93.700.000	411.700.100	440.750.000	-	-	-	-	-	0,00	0,87
Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.801.000	151.801.000	151.801.000	298.980.000	298.980.000	140.202.000	856.304.000	108.500.000	108.500.000	141.771.400	92,36	564,10	71,48	36,29	47,42	0,24	1,14
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	151.801.000	151.801.000	151.801.000	298.980.000	298.980.000	140.202.000	856.304.000	108.500.000	108.500.000	141.771.400	92,36	564,10	71,48	36,29	47,42	0,24	1,14
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.721.633.650	1.721.633.650	1.721.633.650	1.883.667.050	1.883.667.050	1.555.283.125	847.437.200	1.753.191.000	516.765.000	515.320.000	90,34	49,22	101,83	27,43	27,36	0,02	-0,02
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.721.633.650	1.721.633.650	1.721.633.650	1.883.667.050	1.883.667.050	1.555.283.125	847.437.200	1.753.191.000	516.765.000	515.320.000	90,34	49,22	101,83	27,43	27,36	0,02	-0,02

*RKPD

c. Kelompok sasaran pelayanan PD

Dalam Menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah memiliki kelompok sasaran Pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap tahapan kehidupan, mulai dari janin hingga lansia, mencakup kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang terintegrasi dalam berbagai tingkatan (primer, sekunder, tersier) serta jenis layanan (rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dokter keluarga) untuk memelihara, meningkatkan, mencegah, menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara menyeluruh.

d. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Dalam menjalankan pelayanan pada bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah bermitra dengan Klinik, Rumah Sakit Swasta, dan BPJS Kesehatan. Pada Tahun 2024 terdapat 57 Klinik yang terdata sebagai fasilitas pelayanan primer dan rujukan yang membantu Dinas Kesehatan Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Kesehatan Daerah bermitra dengan empat rumah sakit swasta di Demak yaitu Rumah Sakit Umum Pelita Anugerah, Rumah Sakit Hj. Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah Demak, Rumah Sakit Islam NU Demak, dan Rumah Sakit Umum Charlie Hospital Demak. BPJS Kesehatan bermitra dengan Dinas Kesehatan Daerah dalam Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Selain itu, dalam kegiatan pemberian pelayanan pada penderita HIV, Dinas Kesehatan Daerah melaksanakan kegiatan bersama dengan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Fatayat NU dalam penjangkauan LSL dan Transgender, FKPB (Forum Kesehatan Peduli Batang) dalam penjangkauan WPS/PSP, dan PEKA (Peduli Kasih) dalam Pendampingan ODHIV. Dinas Kesehatan Daerah juga bermitra dengan PMI kabupaten demak dalam kegiatan P3K Des PSC 119.

e. Kerja sama Daerah yang menjadi tanggung jawab PD

Dalam pencapaian tugas fungsi Dinas Kesehatan Daerah bekerja sama dengan pihak swasta, khususnya pada pengelolaan kesehatan jiwa Dinas Kesehatan Daerah bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Gondo Amino dalam hal rujukan pasien dengan gangguan kesehatan jiwa. Selain dengan rumah sakit jiwa, Dinas Kesehatan Daerah juga bekerjasama dengan panti rehabilitasi Ngudi Laras Pati dan Ngudi Waluyo Kendal. Selain itu, Dinas Kesehatan Daerah juga bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam hal Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dalam kegiatan pendampingan untuk penderita HIV Dinas Kesehatan Daerah mulai bekerjasama dengan Yayasan Kasih Suwitno yang merupakan mentor lokal HIV.

f. Inovasi Dinas Kesehatan Daerah

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak memiliki beberapa inovasi dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Berikut ini adalah Inovasi dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak :

1. CME (Cengkraman Mata Elang)

Masih tingginya AKI, AKB dan kasus stunting yang disebabkan oleh karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat, kemiskinan yang masih tinggi, adat istiadat yang masih kolot, rujukan terlambat, kepedulian masyarakat yang masih rendah. Maka perlu adanya sebuah inovasi yang mudah, murah dan dapat dikelola oleh masyarakat sendiri dan bermanfaat untuk masyarakat sehingga diciptakan inovasi Cengkraman Mata Elang (CME).

Cengkraman Mata Elang adalah inovasi berupa aplikasi untuk memantau kesehatan ibu hamil dan bayi di Kabupaten Demak. Inovasi ini bertujuan untuk mencegah kematian ibu dan bayi, serta stunting. Inovasi ini semula bertujuan untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Dalam

perjalanannya Inovasi ini berkembang dengan menambahkan menu Pemantauan Stunting sehingga saat ini Cengkraman mata elang (CME) telah menjadi CME Plus. Dengan Aplikasi CME Plus ini maka Data dapat terintegrasi dalam satu wadah dari tingkat kader, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan sehingga memudahkan kader melaporkan kondisi bumil, ibu bersalin dan balita stunting di wilayah kerjanya. Selain itu, Pemantauan bumil, ibu bersalin dan balita stunting berada dalam satu wadah.

2. Rumah gizi Balita

Perlunya intervensi yang melibatkan Lintas program dan Lintas sektor untuk menurunkan stunting menjadi latar belakang munculnya inovasi Rumah Gizi Balita dengan tujuan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan dengan harapan menurunnya angka stunting di Kabupaten Demak. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pendekatan keluarga, pemberian informasi dan mengajari bagaimana pola asuh dan pola makan yang tepat, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dengan masalah gizi secara berkala dengan penerima manfaat adalah balita dengan masalah gizi (stunting).

3. LATANZA (*Pelayanan Antar Jemput Pasien dan Pelayanan Mobil Ambulance Jenazah*)

Tingginya permintaan kebutuhan masyarakat untuk pelayanan jemput pasien di rumah dan pelayanan mobil Ambulance Jenazah di daerah yang jauh dari pusat fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Demak menjadi latar belakang inovasi Latanza ini. Inovasi ini untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan pra Rumah Sakit terhadap pasien (masyarakat Kabupaten Demak). Hasil dan dampak dari inovasi ini adalah Memberikan akses pelayanan kesehatan yang bermutu, cepat, tepat, mudah dijangkau, merata, berkualitas dan gratis. Yang sejalan dengan salah satu Program Demak *Smart City* yang

mempunyai tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yaitu meningkatkan pemenuhan prasarana sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan. LATANZA telah diterapkan dan diadaptasi oleh 27 Puskesmas dan 6 Rumah Sakit , 45 Klinik.

4. SI PEKA BATUK (*Peduli Batuk Jangan di Tunda*)

SI PEKA BATUK merupakan sebuah inovasi dari pengembangan sistem inovasi skrining tuberkulosis untuk deteksi dini melalui peran aktif masyarakat dan sebagai upaya dalam pengendalian tuberkulosis dalam melindungi diri dan keluarga. Tujuan adanya inovasi ini adalah untuk menjangkau seluruh sasaran skrining terduga tuberkulosis dan mengurangi limbah kertas serta dapat dengan mudah diakses dimanapun. Siapapun dapat melakukan skrining mandiri TBC (Tuberkulosis) dengan cara mengakses alamat webnya di <http://sipekabatuk.com/>.

5. SI PENTING (*Sistem Pemantauan Stunting*)

Sistem Pemantauan Stunting merupakan Sistem Pemantauan Bayi Baru Lahir melalui Aplikasi Simpus pada Puskesmas. Sistem ini bertujuan untuk mengetahui bayi yang lahir beresiko Stunting akan langsung mendapatkan pendampingan terfokus dari tenaga kesehatan di puskesmas. Bayi Baru Lahir yang beresiko tinggi stunting akan dilakukan terapi berupa pemberian zinc sirup selama satu bulan yang kemudian akan dievaluasi kembali untuk ditemukan hasil serta tindak lanjut agar bayi tidak beresiko stunting.

6. Bestiku (*Bersama EPPGBM dan EKOHORT atasi Stunting dan Kematian Ibu*)

Kegiatan inovasi ini merupakan implementasi daerah berdasarkan kebijakan dari dinas kesehatan provinsi jawa tengah. Tujuan adanya inovasi ini adalah untuk memaksimalkan pencatatan dan pelaporan Bayi, Balita, dan Ibu Hamil pada Aplikasi ePPGBM sehingga data yang diperoleh akan akurat. Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan kader posyandu, bidan desa, bidan

koordinator, Bidan PJ program anak, dan PJ Program gizi dengan sasaran Ibu hamil, Bayi, dan Balita. Pelaksanaan kegiatannya berupa penginputan hasil pelayanan posyandu pada aplikasi SigiziTerpadu (ePPGBM) setiap selesai kegiatan posyandu, sehingga pada akhir bulan seluruh data telah terinput.

7. *Grabdabu(Gerakan Bersama Minum Tablet Tambah Darah (TTD) pada Remaja Putri setiap hari Rabu)*

Inovasi ini bertujuan dalam pencegahan anemia pada remaja putri, mengingat masih adanya kasus anemia pada remaja hingga saat ini, kegiatan ini untuk meningkatkan konsumsi tablet tambah darah pada semua remaja putri di sekolah maupun di pondok pesantren sehingga dapat menekan angka kasus anemia pada remaja. Dalam kegiatan ini tenaga kesehatan bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan pengurus pondok pesantren untuk melakukan kegiatan minum tablet tambah darah setiap hari rabu.

8. *Web Sidanda (Wb Sistem Informasi Bidan Desa)*

Masih adanya kasus angka kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) membuat seluruh tenaga kesehatan, bidan desa, dan seluruh pihak terkait meningkatkan kinerjanya untuk menurunkan kasus AKI dan AKB. Sehingga dibuatlah inovasi Web Sidansa yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja bidan desa dalam penurunan kasus Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Kegiatan dilaksanakan dengan cara setiap akhir bulan bidan Desa diharuskan mengunggah rencana kegiatan di web untuk kegiatan bulan berikutnya. Rencana kegiatan yang telah di upload maka realisasinya juga harus diupload pada web tersebut berserta dengan foto hasil kegiatannya.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Demak.

a. Tantangan

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Demak masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang ada dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Beberapa tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Demak antara lain:

1. Adanya kesepakatan internasional untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) sebagai kesepakatan pembangunan global pada tahun 2030. Pencapaian target ini dapat mendorong pemerintah kabupaten Demak dalam mencapai target-target indikator kesehatan khususnya dalam SDG's tujuan 1 yaitu Mengurangi Kemiskinan, Dinas Kesehatan Daerah memiliki indikator Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial (PBI) dan Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang kesehatan. Pada tujuan 2 SDG's yaitu Tanpa Kelaparan didukung dengan indikator Kesehatan berupa Prevalensi Stunting dan Prevalensi Wasting. Pada Tujuan 3 SDG's yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera memiliki tantangan dalam penurunan Jumlah Kasus Kematian Ibu, Insiden Tuberkulosis per 100.000 Penduduk, Kasus Malaria Positif, Kasus Infeksi baru hepatitis, kasus baru penyakit tropis yang diobati (filariasis dan kusta), Jumlah kasus hipertensi, Jumlah kasus obesitas, dan Jumlah tenaga kesehatan (9 Jenis tenaga strategis di puskesmas).
2. Ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan. menjadi tantangan bagi Dinas Kesehatan Daerah Demak untuk mencapai target-target SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

3. Kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar tingkat sosial ekonomi masih terjadi di Kabupaten Demak menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang adil dan bermutu bagi seluruh penduduk pada semua tingkatan sosial ekonomi.
4. Meningkatnya kasus kematian bayi menjadi salah satu tantangan Dinas Kesehatan Daerah untuk menekan Angka Kematian Bayi (AKB).
5. Tantangan lain yang dihadapi adalah kecenderungan meningkatnya masalah kesehatan jiwa, masalah kesehatan yang berkaitan dengan usia lanjut yang akan menyebabkan meningkatnya beban pelayanan dan pembiayaan kesehatan, kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan akibat kerja, dampak perubahan iklim dan pencemaran lingkungan serta perubahan gaya hidup yang tidak sehat.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Kesehatan Daerah untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka mendorong dan pengembangan pembangunan Kesehatan adalah:

1. Dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak.
2. Potensi Sumber daya masyarakat yang cukup kondusif, untuk didayagunakan dan diberdayakan dalam pembangunan kesehatan.
3. Potensi Sumber Daya Kesehatan yang cukup kompeten untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan BLUD dalam peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat dan mutu layanan kesehatan.

5. Berkembangnya teknologi informasi untuk mendukung pemantapan manajemen kesehatan.
6. Dukungan pendanaan pemerintah pusat dalam peningkatan pelayanan kesehatan melalui anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang digunakan dalam pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan Urusan Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Demak diantaranya berupa masih adanya kasus stunting dan kekurangan gizi, kurangnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat, belum optimalnya akses pelayanan kesehatan, belum optimalnya standarisasi, dan jaminan pelayanan kesehatan, khususnya masyarakat miskin.

Dalam perumusan permasalahan dan isu strategis Dinas Kesehatan Daerah dilakukan dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Kesehatan Daerah, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Kesehatan Daerah.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Demak, tugas pokok Dinas Kesehatan Daerah Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Kesehatan Daerah, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan jangka menengah Dinas Kesehatan Daerah yaitu :

1. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
2. Belum Optimalnya Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan
3. Masih Rendahnya Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
4. Masih adanya Kasus Gizi di Masyarakat
5. Belum Optimalnya Kualitas Kesehatan Lingkungan
6. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja
7. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik.

Ketujuh permasalahan tersebut dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan
Dinas Kesehatan Daerah Demak

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya Kualitas dan kompetensi sumberdaya kesehatan b. Belum Optimalnya Standarisasi Fasilitas Kesehatan c. Masih belum Optimalnya Pencegahan dan Pengendalian Terhadap Penyakit d. Masih rendahnya Kualitas Layanan Kesehatan disetiap Siklus Hidup e. Masih Rendahnya penerapan Teknologi Informasi di bidang Kesehatan.
2.	Belum Optimalnya Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya cakupan jaminan kesehatan b. Belum meratanya fasilitas kesehatan
3.	Masih Rendahnya Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	<ol style="list-style-type: none"> a. Cakupan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) belum Optimal. b. Kemitraan Kesehatan Masyarakat belum Optimal c. Masih Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat
4.	Masih adanya Kasus Gizi di Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya Cakupan Asi Eksklusif b. Masih adanya kasus Stunting c. Pemantauan Tumbuh Kembang Anak belum Optimal d. Belum Tercukupinya Kebutuhan Energi Minimal Individu yang menyebabkan masih adanya kasus ibu hamil KEK e. Belum optimalnya mutu peredaran makanan dan minuman yang aman
5.	Belum Optimalnya Kualitas Kesehatan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum Optimalnya Kualitas Air Minum b. Belum Optimalnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) c. Belum optimalnya Kualitas Tempat Fasilitas

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Umum (TFU)
6.	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja	a. Masih Rendahnya Kualitas Perencanaan Kinerja b. Masih Rendahnya Kualitas Penganggaran Daerah c. Masih Rendahnya Kualitas Pelaporan Evaluasi Kinerja
7.	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	a. Masih Rendahnya Keterbukaan Informasi Publik b. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Aparatur c. Sarana Prasarana Penunjang masih ada yang belum memadai

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Kesehatan Daerah dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat disebabkan karena Belum optimalnya Kualitas dan kompetensi sumberdaya kesehatan. Masih belum terpenuhinya indikator puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan lengkap (Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Apoteker, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (PKIP), Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), Tenaga Sanitasi Lingkungan (TSL), dan Ahli Gizi (Nutrisionis). Meskipun untuk Indikator Puskesmas tersedia dokter telah mencapai 100% pada tahun 2024, namun untuk puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan lengkap belum terpenuhi 100%. Pada tahun 2024 masih ada 4 puskesmas yang belum memenuhi indikator ini yaitu puskesmas Karanganyar I dan Wedung I dengan belum terpenuhinya tenaga Sanitasi Lingkungan. Puskesmas Karanganyar II dan Mijen I Belum terpenuhi untuk Tenaga Promosi Kesehatan.

Selain itu penyebab lainnya adalah belum optimalnya standarisasi/akreditasi fasilitas kesehatan karena belum semua fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan pemantapan mutu,

dari 57 Klinik yang ada belum semuanya terakreditasi, masih ada 13 klinik yang belum terakreditasi, meskipun sarana pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah yaitu puskesmas telah terakreditasi seluruhnya. Pembinaan dan penyiapan akreditasi maupun reakreditasi sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan merupakan upaya penjaminan mutu pelayanan kesehatan berkelanjutan.

Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular juga menjadi salah satu faktor belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Masih adanya penyakit menular dan tidak menular menjadi salah satu bukti bahwa pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Kasus kusta pada tahun 2024 meningkat menjadi 39 kasus dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 yaitu sebanyak 32 kasus dan 20 kasus. Selain itu, jumlah kasus hipertensi juga meningkat pada tahun 2024 yaitu sebanyak 309.979 kasus sedangkan pada tahun 2023 kasus hipertensi sebanyak 309.281 kasus. Masih adanya kasus malaria import pada tahun 2024 sebanyak 19 kasus. Selain itu, jumlah orang penderita Tuberkulosis pada tahun 2024 juga meningkat dengan penderita sebanyak 2.223, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 1.500 penderita. Masih adanya kasus HIV dengan Penderita HIV sebanyak 164 orang. Selain itu pada tahun 2024 Angka Kematian Bayi (AKB) memiliki kasus yang cukup tinggi. Capaian kinerja menunjukkan angka sebesar 7,46/1.000KLH dari target 3,41/1.000KLH dengan persentase sebesar -18,73%. Capaian pada tahun 2024 untuk kasus kematian bayi masuk kedalam kategori capaian sangat rendah. Pada tahun 2024 kasus kematian bayi sebanyak 123 kasus. Tingginya kasus kematian bayi ini disebabkan karena adanya Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia, Sepsis, Kelainan Kongenital, Pneumonia, Kelainan Saluran Cerna.

2. Belum Optimalnya Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan

Belum Optimalnya Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan disebabkan oleh cakupan jaminan kesehatan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Masih ada 7.460 penduduk yang belum tercakup dalam jaminan kesehatan nasional pada tahun 2024. Belum meratanya fasilitas kesehatan, meskipun pada tahun 2024 distribusi puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar telah merata di 14 kecamatan, akan tetapi masih ada kecamatan yang hanya memiliki satu puskesmas saja padahal memiliki wilayah kerja yang cukup luas. Hal ini menyebabkan masyarakat disekitarnya yang akan mengakses pelayanan puskesmas sedikit kesulitan karena lokasi puskesmas yang jauh dari penduduk desa yang terpencil atau jauh dari lokasi puskesmas. Selain itu, kondisi puskesmas pembantu yang berjumlah 45 unit pada tahun 2024 mengalami kerusakan berat sebanyak 19 puskesmas pembantu, kerusakan sedang sebanyak 9 puskesmas pembantu, dan kerusakan ringan sebanyak 4 puskesmas pembantu. Dari 45 unit tersebut hanya ada 13 puskesmas pembantu yang masih dalam keadaan baik. Selain itu, keberadaan rumah sakit di kabupaten Demak pada daerah timur belum terpenuhi. Rumah sakit di Kabupaten Demak lebih banyak terletak di daerah perkotaan.

3. Masih Rendahnya Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

Posyandu Integratis Layanan Primer (ILP) masih belum optimal, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan kader kesehatan terlatih menjadi salah satu penyebabnya, selain itu jumlah posyandu yang masih belum merata dan keterbatasan sarana prasarana dalam pelaksanaannya juga menjadi salah satu penyebab Posyandu ILP belum Optimal. Selain itu, jumlah posyandu aktif saat ini juga baru mencapai sekitar 50%.

Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga menjadi salah satu permasalahan dalam UKBM.

Masyarakat tidak merokok hingga 2024 masih 58% (211.556 dari 364.405 rumah tangga) dengan kata lain masih banyak masyarakat yang merokok. Konsumsi Minuman keras juga masih terjadi pada beberapa rumah tangga. Kegiatan cuci tangan dan gosok gigi juga belum terlaksana dengan maksimal.

4. Masih Adanya Kasus Gizi di Masyarakat

Status Gizi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi yang didasarkan pada berat badan dan tinggi badan anak. Pada Tahun 2024 masih terdapat kasus stunting di kabupaten Demak dengan prevalensi stunting mencapai angka 10% pada anak dibawah lima tahun atau balita. Selain itu masih ada kasus wasting pada tahun 2024 dengan capaian prevalensi wasting sebesar 4,04%. Indikator untuk prevalensi stunting dan dan prevalensi wasting bersifat negatif yang artinya apabila semakin tahun capaiannya menurun maka menunjukkan kinerja yang semakin baik. Bila dibandingkan dengan capaian prevalensi stunting tahun 2023 sebesar 9,5%, maka pada tahun 2024 capaian stunting naik. Hal ini disebabkan karena penghitungan prevalensi stunting pada tahun 2024 berbeda dengan tahun 2023, pada tahun 2024 *severelly stunting* atau balita berpotensi stunting menjadi komponen dalam penghitungan.

5. Belum Optimalnya Kualitas Kesehatan Lingkungan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam mengoptimalkan kualitas kesehatan lingkungan adalah belum optimalnya kualitas air minum, Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh oleh Kementerian Kesehatan dalam pengawasan kualitas air minum adalah Inspeksi Kesehatan Lingkungan atau IKL. Pelaksanaan IKL dilakukan oleh tenaga sanitarian puskesmas, kader kesehatan lingkungan, atau kader lain di desa yang telah mendapatkan pelatihan praktis pemantauan kualitas sarana air minum. Pada tahun 2024 hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Demak sudah mencapai rata-rata 93,4% akan tetapi masih ada

wilayah yang kualitas air minumnya belum optimal yaitu wilayah puskesmas Demak I yang masih 68,97%, Mranggen 1 70%, dan Puskesmas Mijen II yang masih 78,57%.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) memiliki tiga komponen yaitu Penciptaan Lingkungan yang Kondusif, Peningkatan Kebutuhan Sanitasi, dan Peningkatan Penyediaan Akses Sanitasi. Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada 5 Pilar STBM yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan. Pilar STBM terdiri atas perilaku:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
2. Cuci Tangan Pakai Sabun;
3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga

Capaian 5 Pilar STBM di Kecamatan di Kabupaten Demak pada tahun 2024 sebagian besar telah baik, akan tetapi masih ada Kecamatan yang belum optimal dalam melaksanakan 5 Pilar STBM. Capaian 5 Pilar STBM pada tahun 2024 adalah 37,35% dari 249 desa/kelurahan baru 93 desa/kelurahan yang telah mencapai 5 pilar STBM.

Tempat dan fasilitas Umum (TFU) dilakukan berdasarkan standar IKL yang meliputi Perdagangan (Pasar Rakyat), Sekolah (SD/MI dan SMP/MTs), dan Puskesmas. Pada Tahun 2024 TFU di kabupaten Demak telah terdaftar sebanyak 914 dan TFU yang telah dilakukan pengawasan sesuai standar sebanyak 855 meliputi Sekolah SD/MI sebanyak 620, SMP/MTs sebanyak 180, dan Puskesmas sebanyak 27. TFU perdagangan pada pasar jumlahnya paling rendah diantara TFU yang lain yakni sebesar 75,68%. Sedangkan untuk Puskesmas telah mencapai 100%. Untuk SMP/MTs sebesar 84,51%, dan untuk SD/MI sebesar 97%.

6. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja

Akar masalah yang dihadapi Dinas Kesehatan Daerah dalam hal ini adalah belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja, implementasi SAKIP Dinas Kesehatan Daerah pada Tahun 2024 mendapatkan nilai 84,00 dari target sebesar 84,73. Faktor yang masih perlu diperhatikan dari hasil evaluasi SAKIP adalah masih Rendahnya Kualitas Perencanaan Kinerja, Masih Rendahnya Kualitas Penganggaran Daerah, dan Masih Rendahnya Kualitas Pelaporan Evaluasi Kinerja. Permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target SAKIP 2024 adalah target kinerja 2024 pada perjanjian kinerja eselon II tidak berdasarkan pada capaian kinerja tahun 2023 dengan menyusun perjanjian kinerja perubahan, dokumen crosscutting masih belum mencerminkan program dan kegiatan yang merupakan program unggulan kegiatan, Dalam dokumen RKT belum terdapat pagu anggaran. Dalam pengukuran kinerja, Dinas kesehatan belum menyajikan surat rekomendasi dari kepala OPD untuk Penempatan/penghapusan jabatan berdasarkan pengukuran kinerja, Dinas Kesehatan juga belum menyusun dan menetapkan SOP Pengukuran Kinerja dan SOP Penentuan Kriteria Reward. Sedangkan pada pelaporan kinerja, belum melakukan reviu berjenjang pada penyusunan dokumen Laporan Kinerja dan Menyajikan dalam dokumen berita acara/notulensi.

7. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada tahun 2024 sebesar 91,02%. Selain itu, masih adanya aduan masyarakat baik yang masuk melalui kanal aduan offline maupun online sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih merasa bahwa pelayanan publik yang

dilakukan oleh aparaturnya pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat.

Masih Rendahnya Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kualitas pelayanan publik. Website atau papan pengumuman yang tidak terupdate membuat informasi publik terbaru tidak dapat diakses oleh masyarakat, selain itu pengelolaan kanal aduan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat belum dikelola secara maksimal menjadi penyebab masih rendahnya keterbukaan informasi publik. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Aparatur disebabkan karena belum terpenuhinya formasi kebutuhan pegawai yang menyebabkan penempatan beberapa ASN di lingkungan Dinas Kesehatan masih berdasarkan kebutuhan organisasi yang disebabkan terbatasnya sumber daya kesehatan. Sarana Prasarana Penunjang masih belum sepenuhnya memadai disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang tersedia.

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Visi RPJMN 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" mencerminkan komitmen nasional untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dalam rangka mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita dituangkan dalam bentuk Prioritas Nasional yang menjadi landasan utama dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional ini berfungsi sebagai tujuan strategis dan sasaran pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, yang mencakup berbagai sektor penting seperti pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital.

Dalam Strategi Prioritas Pembangunan RPJMN 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan kemiskinan,

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.

Menelaah isu-isu baik global maupun nasional yang ada dalam dokumen RPJMN yang dapat memengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam bagian ini juga dijelaskan program-program dalam RPJMN yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Pembangunan manusia menempatkan manusia dan masyarakat pada bagian sentral sebagai obyek dan subyek pembangunan. Dengan memprioritaskan pembangunan manusia, sebuah negara dapat membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan. Sebagai tolok ukur capaian peningkatan kualitas sumber daya manusia pada RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029, digunakan Indeks Modal Manusia yang merefleksikan potensi kontribusi sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasarkan keterjangkauan akses dan kualitas pembangunan yang tersedia selama periode tumbuh kembang manusia. Dalam lima tahun ke depan, Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat dari 0,54 di tahun 2020 menjadi 0,59 di tahun 2029.

Pilar utama dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang produktif adalah intervensi secara konkret dalam pendidikan dan kesehatan. Intervensi kunci kesehatan dalam hal ini mencakup Penurunan Kematian ibu dan anak, pencegahan dan penurunan stunting, pemberian makan bergizi, Penuntasan Tuberkulosis, Investasi pelayanan kesehatan primer, pembangunan RS lengkap berkualitas, Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses, Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan upaya kesehatan jiwa, peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan Kesehatan Reproduksi, dan produksi dan penyagunaan SDM Kesehatan. Hal ini sejalan dengan

program/kegiatan di Dinas Kesehatan Daerah yang memiliki strategi untuk menekan angka kematian dan kesakitan, menekan angka gizi buruk, dan menekan angka penyakit menular dan tidak menular.

b. Telaahan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari RPJMD Jawa Tengah adalah “Mewujudkan Jawa tengah yang Maju dan Berkelanjutan”. Guna mengukur pencapaian tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah selama tahun 2025-2029 digunakan indikator kinerja yaitu Angka Kemiskinan dan PDRB per kapita sebagai ukuran keberhasilan Jawa Tengah Maju, serta Indeks Reformasi Birokrasi sebagai ukuran keberhasilan Jawa Tengah Berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan daerah yang akan diwujudkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kabupaten Demak tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak RTRW Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak tahun 2011-2031, maka, tujuan RTRW Kabupaten Demak adalah:

“Mewujudkan ruang wilayah Daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan”

Apabila merujuk pada tujuan RTRW Kabupaten Demak dalam Perda No. 6 tahun 2011 fokus utama pengembangan wilayah

Kabupaten Demak tertuju pada sektor Pertanian dan Sektor Perikanan yang didukung oleh Perdagangan dan Jasa dan Industri. Namun, mengacu pada Perda Nomor 1 tahun 2020, maka tujuan pengembangan wilayah difokuskan pada sektor pertanian dan sektor industri sebagai komponen mendasar yang didukung oleh sektor perdagangan, jasa dan pariwisata.

Fokus penataan ruang hingga tahun 2031 mendatang adalah pengembangan wilayah yang terfokus pada sektor pertanian dan juga sektor industri. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan penting bagi penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Demak tahun 2025-2029 di mana aspek penataan ruang perlu menjadi bagian integral agar sektor kewilayahan dapat menjadi pengungkit arah pembangunan Kabupaten Demak.

Dalam hal penelaahan terhadap RTRW, terdapat tiga aspek mendasar yang perlu digarisbawahi, yaitu struktur tata ruang, pola ruang dan kawasan strategis. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Isu penting dari sisi penataan ruang Kabupaten Demak adalah kondisi geografis Kabupaten Demak yang merupakan salah satu wilayah pesisir yang terletak di utara Jawa. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang dan berada pada koridor ekonomi Pulau Jawa menyebabkan perkembangan wilayah ini sangat cepat. Penambahan lahan terbangun ini memberikan beban tambahan pada tanah, padahal kondisi tanah pada wilayah ini adalah tanah yang masih muda. Tanah seperti ini masih belum terkonsolidasi dengan baik sehingga penambahan beban di atasnya menyebabkan terjadinya pemampatan.

Keberadaan kawasan pemukiman dan industri juga menyebabkan meningkatnya aktivitas pemompaan air tanah, terutama pada kawasan industri dikarenakan kebutuhan airnya yang cukup banyak. Adanya beban di atas tanah dan rongga tanah akibat pengambilan air tanah kemudian memicu terjadinya fenomena penurunan muka tanah. Penurunan tanah di wilayah pesisir ini menyebabkan meningkatnya tinggi genangan akibat banjir pasang. Peningkatan permukaan air laut di Kabupaten Demak hingga tahun

2010 mencapai rata-rata 3,2 mm per tahunnya sejak 1993. Kenaikan permukaan air laut menyebabkan tergenangnya lahan basah dan lahan rendah, erosi pantai, intrusi air tanah sehingga menimbulkan genangan banjir rob yang telah menyebabkan dampak negatif yang besar karena menghambat aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Demak.

Oleh karenanya, dalam konteks integrasi antara rencana tata ruang wilayah dan RPJMD, Isu bencana pesisir perlu diangkat, sehingga tercermin dalam salah satu misi ataupun program prioritas (sehingga dapat mengungkit efek lainnya. Isu strategis mengenai infrastruktur *mitigative* atas permasalahan yang terjadi di Kabupaten Demak perlu menjadi program utama dengan skema pembiayaan APBN karena lintas wilayah. Pada saat tanggul terbangun maka dapat memicu aktivitas industri, industri kelautan, dan kawasan terbangun lainnya.

Selain hal di atas, hasil kajian sektoral sebelumnya menunjukkan bahwa *Urban Sprawl* kota Demak sudah mencapai 7 km, perlu kota satelit pendukung dengan tematik masing-masing misalnya kota pendidikan di sisi barat Sport Center, dan kota jasa dan logistik di selatan mendekati terminal. Lahan tersisa di dalam radius <5 km dari inti kota terbatas, sebaiknya untuk alokasi perumahan skala menengah dan besar, sehingga kota tetap harmoni dan menyumbang pendapatan yang tinggi. Dengan adanya *exit tol* di radius 3 km, akan

semakin mempercepat naiknya kebutuhan pembangunan perumahan di Kota Demak.

d. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Terdapat 13 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Kesehatan Daerah adalah terkait Masih Rendahnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.2
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Masih Rendahnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI) masih belum mencapai target Nasional
	2. Masih Adanya Prevalensi Obesitas pada penduduk umur lebih dari sama dengan 18 Tahun
	3. Persentase Merokok pada Penduduk umur lebih dari sama dengan 15 Tahun masih Meningkat

Sumber: Laporan KLHS Kabupaten Demak

Tabel 3.3
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 Dinas Kesehatan Daerah

No	Indikator	Target					Target Perpres 111/2022	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.1.(a)	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	Meningkat menjadi 98%	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	100	100	100	100	100	Meningkat menjadi 70%	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	85,2	88,16	91,12	94,08	97,04	Meningkat menjadi 90%	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap
2.2.1	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita	7,5	7,32	7,14	6,95	6,77	Menurun menjadi 14%	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita
2.2.2	Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) anak	0,024	0,019	0,015	0,01	0,005	Menurun	Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
2.2.2.(a)	Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil	2,74	2,19	1,65	1,10	0,55	Menurun	Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil
2.2.2.(b)	Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	86,43					Meningkat	Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
3.1.1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	NA	NA	NA	NA	NA	Menurun	Angka Kematian Ibu (AKI)
3.1.2.	Proporsi Perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	100	100	100	100	100	Meningkat menjadi 95%	Proporsi Perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
3.1.2.(a)	Proporsi Perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas Kesehatan	100	100	100	100	100	Meningkat menjadi 95%	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
3.2.1.	Angka Kematian Balita (AKBa) per Kelahiran Hidup	3,75	3	2.25	1,5	0,75	Menurun menjadi 16	Angka Kematian Balita (AKBa) per Kelahiran Hidup
3.2.2.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup	85	70	55	40	25	Menurun jadi 10	
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	3,2	2,5	1,9	1,3	0,6	Menurun jadi 24	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup
3.2.2.(b)	Persentase Kabupaten/Kota	88,42	89,73	91,05	92,37	93,68	Meningkat menjadi	Persentase Kabupaten/Kota yang

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No	Indikator	Target					Target Perpres 111/2022	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
	yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi						95%	mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
3.3.3.	Kejadian Malaria Per 1000 Orang	0,0033	0,0027	0,002	0,0013	0,0007	Menurun	Kejadian Malaria Per 1000 Orang
3.3.3.(a)	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai Eliminasi Malaria	1	1	1	1	1	Eliminasi	-
3.3.4.(a)	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	NA	NA	NA	NA	NA	Menurun Menjadi 1,09%	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B
3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasi dan Kusta)	0	0	0	0	0	Menurun	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasi dan Kusta)
3.3.5.(b)	Jumlah Kabupaten/Kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	1	1	1	1	1	Meningkat	Jumlah Kabupaten/Kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)
3.4.1.(a)	Persentase Merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	NA	NA	NA	NA	NA	Menurun Menjadi 8,7%	Persentase Merokok pada penduduk umur ≥15 tahun
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	100	100	100	100	100	Tidak Meningkat (34,1%)	-
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	14,44	15,91	17,39	18,86	20,33	Tidak Meningkat (21,8%)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	79,51	79,61	79,71	79,81	79,91	Meningkat Menjadi 63,4%	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	3	2	2	1	1	Menurun Menjadi 38	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	1,88	1,76	1,64	1,52	1,4	Menurun Menjadi 2,28	Total Fertility Rate (TFR).
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	NA	NA	NA	NA	NA	Meningkat	-
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	100	100	100	100	100	Meningkat Menjadi minimal 95%	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	23.8	19.1	14.3	9.5	4.8	Menurun	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga	NA	NA	NA	NA	NA	Meningkat	-

No	Indikator	Target					Target Perpres 111/2022	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
	kesehatan.							

Sumber: Laporan KLHS Kabupaten Demak

e. Telaahan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK)

Telaah Dokumen lainnya dalam hal ini merupakan telaah pada Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dari Kementerian Kesehatan. Rencana Induk Bidang Kesehatan dikoordinasikan oleh menteri kesehatan bekerja sama dengan pemangku kepentingan sektor kesehatan di pusat dan daerah. Pembaharuan Fokus sektor kesehatan nasional tertuang dalam dokumen RIBK 2025-2029 yang disusun mengacu pada arah kebijakan pembangunan kesehatan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.

Sebagai bentuk penyelarasan program kesehatan nasional dalam RIBK 2025-2029 dengan program kesehatan di daerah, telah ditentukan indikator kinerja kesehatan yang perlu dicantumkan dalam dokumen RPJMD 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah (PD) 2025-2029.

f. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, visi Kabupaten Demak untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Dalam visi ini terkandung tiga rumusan pokok visi yakni **“Bermartabat, Maju, Sejahtera”**. Dinas Kesehatan Daerah sebagai pengampu urusan bidang kesehatan mendukung visi bupati yaitu **Sejahtera**. Adapun filosofi dan penjabaran makna pokok visi Sejahtera yaitu menekankan tercapainya kesejahteraan sosial yang adil, merata, dan berkelanjutan. Seluruh lapisan masyarakat berhak memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi, serta dapat menikmati lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan layak.

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dinas Kesehatan Daerah mendukung misi bupati yang pertama yaitu :

MISI 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing dan Berakhlak

Misi ini dilaksanakan terutama untuk mewujudkan pokok visi “Semakin Bermartabat”. Kualitas sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Sumber daya manusia yang berdaya saing dimaknai dengan kualitas yang sehat, cerdas, produktivitas tinggi, dan berwawasan luas. Sumber daya manusia yang berakhlak diwujudkan melalui pembangunan kualitas karakter manusia yang religius dan berbudaya.

MISI 2: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas

Perwujudan masyarakat yang “Semakin Bermartabat” diupayakan pula melalui keteladanan kepemimpinan dan penguatan tata kelola pemerintahan. Pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas akan melahirkan kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

Dinas Kesehatan Daerah secara langsung berkontribusi membantu Bupati-Wakil Bupati dalam melaksanakan misi pertama yaitu pada tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berakhlak dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Indikator yang diacu Dinas Kesehatan Daerah adalah Usia Harapan Hidup.

Dalam RPJMD terdapat rumusan Tujuan yang akan dicapai dalam RPJMD tahun 2025-2029. Dinas Kesehatan Daerah mendukung tujuan pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, dan Berkarakter. Dalam rangka memaksimalkan Pembangunan daerah Kabupaten Demak, tujuan ini dicapai dengan sasaran yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Usia Harapan Hidup pada tahun 2024 mencapai 75,79 dan pada akhir periode angka 77,11 harus dicapai. Sasaran Meningkatnya

Pemajuan Kebudayaan dengan indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan Daerah sebesar 77,00 harus dicapai diakhir periode.

Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah adalah Demak Mantap.

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Kesehatan Daerah

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak, telaahan kajian lingkungan hidup strategis, dan telaahan Visi-Misi dan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati terpilih, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Kesehatan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Isu Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
Dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak.	Belum Optimalnya Kualitas pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) masih belum mencapai target Nasional	Masih adanya Kesenjangan terhadap Pelayanan Kesehatan dan Ketimpangan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Akses dan Kualitas belum merata di sektor kesehatan.	Peningkatan Kasus penyakit tidak menular pada usia produktif (termasuk masalah kesehatan jiwa)	Masih Adanya Kasus stunting dan Gizi buruk pada Balita

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
Potensi Sumber daya masyarakat yang cukup kondusif, untuk didayagunakan dan diberdayakan dalam pembangunan kesehatan.	Belum Optimalnya Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Masih Adanya Prevalensi Obesitas pada penduduk umur lebih dari sama dengan 18 Tahun	Meningkatnya Beban Penyakit Tidak Menular seperti Diabetes, Hipertensi, dan Obesitas		Masih adanya masalah kelebihan dan kekurangan gizi (Underweight, Wasting, Stunting, Overweight)	Masih Adanya Penyakit Menular dan Penyakit tidak Menular
Potensi Sumber Daya Kesehatan yang cukup kompeten untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan.	Masih Rendahnya Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Persentase Merokok pada Pneduduk umur lebih dari sama dengan 15 Tahun masih Meningkat			Kurang Optimalnya mutu pelayanan kesehatan primer dan lanjutan	Belum Terkendali-nya Angka Kesakitan dan Angka Kematian
Berkembangnya teknologi informasi untuk mendukung pemantapan manajemen kesehatan.	Masih adanya Kasus Gizi di Masyarakat				Distribusi Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum merata	Belum Optimalnya Akses Pelayanan Kesehatan
Dukungan pendanaan pemerintah pusat dalam peningkatan pelayanan kesehatan melalui anggaran DBHCHT yang digunakan dalam pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Belum Optimalnya Kualitas Kesehatan Lingkungan					Belum Optimalnya Mutu Pelayanan Kesehatan
	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja					Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan berintegritas
	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik.					

Sumber: RPJMD Kab Demak, RPJMN, RPJMD Prov. Jateng (2025-2029)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Daerah ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Kesehatan Daerah. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Daerah untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Menurunnya Kematian dan Kesakitan;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Kesehatan Daerah.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,79	75,91	76,08	76,30	76,59	77,11	77,43	Perhitungan Usia harapan hidup (UHH) sangat bergantung pada data kematian dalam tabel kematian dan mengikuti prosedur yang ditentukan dalam metode <i>life table</i> (BPS)
		Sasaran 1. Menurunnya Kematian dan Kesakitan	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	8	12	12	11	11	10	10	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat
			Jumlah Kematian Balita	Kasus	146	146	145	145	144	144	143	Jumlah kematian balita dengan jumlah kelahiran hidup dalam periode tertentu
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	10,00	7,50	7,32	7,14	6,95	6,77	6,59	Angka yang menunjukkan anak stunting dalam satu periode tertentu Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) atau Survei Kesehatan Indonesia (SKI)
			Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	Angka	NA	66,67	66,67	70,37	74,07	77,78	81,48	Jumlah Puskesmas dengan proporsi non Hipertensi minimal 75 %, proporsi non Diabetes Militus minimal 85%, dan memiliki peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dibagi 27 Puskesmas x 100

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					1	2	3	4	5	6	7	
			Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	Angka	NA	18,51	25,92	33,33	37,63	40,74	44,44	Puskesmas yang memenuhi komponen; keberhasilan pengobatan TB > 90%, Penemuan TB >90%, eradikasi frambusia, dan eliminasi malaria dibagi 27 Puskesmas dikali 100
		Sasaran 2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Kesehatan Daerah	Indeks Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah	Angka	4,60	4,62	4,66	4,71	4,76	4,81	4,85	Hasil Desk PPM
			Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Daerah	Angka	84,00	84,10	84,20	84,30	84,40	84,50	84,60	Hasil evaluator reuiu SAKIP Internal

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Kesehatan Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Daerah dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Tabel 3.2.
Tahapan Strategi
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Pengembangan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Percepatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Perwujudan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Pengembangan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Pemantapan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Percepatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Perwujudan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Pengembangan Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Pemantapan Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Percepatan Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Perwujudan Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
Pengembangan Status Gizi Masyarakat	Peningkatan Status Gizi Masyarakat	Pemantapan Status Gizi Masyarakat	Percepatan Status Gizi Masyarakat	Perwujudan Status Gizi Masyarakat
Pengembangan Kualitas Kesehatan Lingkungan	Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan	Pemantapan Kualitas Kesehatan Lingkungan	Percepatan Kualitas Kesehatan Lingkungan	Perwujudan Kualitas Kesehatan Lingkungan
Pengembangan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Daerah	Pemantapan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Daerah	Percepatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Daerah	Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Daerah

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Kesehatan Daerah agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Kesehatan Daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Kesehatan Daerah.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Perluasan Upaya Promotif-Preventif melalui Imunisasi dan Deteksi Dini, Peningkatan Literasi Kesehatan, Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat, dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan 2. Peningkatan Kualitas dan Penyediaan Sarana-Prasarana Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan 3. Pengendalian PTM serta Percepatan Eliminasi PM dan Penyakit Tropis Terabaikan 4. Percepatan Penuntasan Stunting dan Permasalahan Gizi 5. Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Berkualitas 6. Pemenuhan dan Perluasan cakupan Jaminan Kesehatan	1. Peningkatan Kemitraan Kesehatan Masyarakat 2. Peningkatan PHBS di Masyarakat dan Keluarga Akses Rumah Sehat 3. Pemenuhan Layanan Kesehatan disetiap Siklus Hidup 4. Pemenuhan Kecukupan Energi Minimal Individu 5. Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif 6. Peningkatan Cakupan Posyandu ILP 7. Peningkatan Implementasi Teknologi Informasi bidang Kesehatan 8. Peningkatan Peredaran Makan dan Minuman Aman dan Bermutu 9. Peningkatan Peredaran Makanan dan Minuman yang Aman dan bermutu 10. Pemenuhan Kualitas Tempat Fasilitas Umum dan Air Minum 11. Peningkatan Standarisasi Fasilitas Kesehatan 12. Pemerataan Fasilitas Kesehatan 13. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Terhadap Penyakit 14. Peningkatan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak 15. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM 16. Peningkatan Cakupan Jaminan Kesehatan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) di mana penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Dinas Kesehatan Daerah untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

4.1.1. Dukungan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati

Dinas Kesehatan Daerah mendukung pelaksanaan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati pada program prioritas Demak Mantap. Penjelasan pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas

Dinas Kesehatan Daerah mendukung Program Prioritas (PP) Bupati yaitu Demak Cerdas dan Berkarakter, Demak Mantap, Demak Tangguh dan Lestari. Program Prioritas Demak Cerdas dan Berkarakter memiliki 10 Kegiatan Prioritas (KP), Dinas Kesehatan Daerah mendukung Kegiatan prioritas Peningkatan Gizi Masyarakat. Demak Mantap terdiri dari 8 Kegiatan Prioritas, Dinas Kesehatan Daerah mendukung pada Kegiatan Prioritas Pengembangan Fasilitas Kesehatan-Demak Sehat. Demak Tangguh dan Lestari memiliki 6 Kegiatan Prioritas dan Dinas Kesehatan

Daerah mendukung dalam Kegiatan Prioritas Pengentasan Kemiskinan melalui Akses Layanan Dasar Terintegrasi.

Dinas Kesehatan Daerah mendukung program Prioritas Bupati dari kegiatan prioritas ketiga yaitu Pengembangan Fasilitas Kesehatan yang berupa Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan. Secara terinci, dukungan terhadap Program Prioritas disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
Dukungan Program Prioritas Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2025-2030

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal -2024	2026		2027		2028		2029		2030		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Kode	Subkegiatan
PP1.	DEMAK CERDAS DAN BERKARAKTER															
KP10.	PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	10,00	7,32	3.752.668.000	7,14	3.752.668.000	6,95	3.752.668.000	6,77	3.752.668.000	6,59	3.752.668.000		
AP1.	Sosialisasi Intervensi Spesifik Penurunan Stunting	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Penurunan Stunting	Orang	NA	80	4.240.000	80	4.240.000	80	4.240.000	80	4.240.000	80	4.240.000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
AP2.	Sosialisasi Pengelolaan Gizi Balita, Ibu Hamil, dan Remaja Putri	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pengelolaan Balita, Ibu Hamil dan Remaja Putri	Orang	NA	240	9.120.000	240	9.120.000	240	9.120.000	240	9.120.000	240	9.120.000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
AP3.	Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK	Jumlah Ibu Hamil KEK yang diberi makanan tambahan	Orang	NA	336	1.566.060.000	336	1.566.060.000	336	1.566.060.000	336	1.566.060.000	336	1.566.060.000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
AP4.	Pemberian Makanan Tambahan Balita Underweight	Jumlah Balita Underweight yang diberi makanan tambahan	Orang	NA	328	2.173.248.000	328	2.173.248.000	328	2.173.248.000	328	2.173.248.000	328	2.173.248.000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
PP5.	DEMAK MANTAP															
KP3.	PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN-DEMAK SEHAT	Jumlah Puskesmas dan pustu yang dikembangkan	Unit	6	0	0	1	600.000.000	1	600.000.000	0	0	1	600.000.000		
AP1.	Rehabilitasi dan Pembangunan Puskesmas dan Pustu	Jumlah Puskesmas dan pustu yang dikembangkan	Unit	6	0	0	1	600.000.000	1	600.000.000	0	0	1	600.000.000	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal -2024	2026		2027		2028		2029		2030		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Kode	Subkegiatan
PP6.	DEMAK TANGGUH DAN LESTARI															
KP1.	PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI AKSES LAYANAN DASAR TERINTEGRASI	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh bantuan akses layanan dasar perumahan dan pendidikan, kesehatan dan jaminan tenaga kerja	Orang	127.564	132.662	54.230.600.500	132.662	54.230.600.500	132.662	54.230.600.500	132.662	54.230.600.500	132.662	54.230.600.500		
AP2.	Pemenuhan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Tenaga Kerja	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pembiayaan jaminan kesehatan dari APBD	Jiwa	127.564	132.662	54.230.600.500	132.662	54.230.600.500	132.662	54.230.600.500	132.662	54.230.600.500	132.662	54.230.600.500	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

4.1.2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Selain mendukung Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati, Dinas Kesehatan Daerah melaksanakan urusan wajib Kesehatan. Program, kegiatan dan subkegiatan dipilih menggunakan teknik *cascading* atas pohon kinerja Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah menggunakan nomenklatur yang disebutkan dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Tabel 4.2.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				603.043.021.387		579.684.753.965		592.313.027.297		600.005.952.987		609.162.289.888		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				603.043.021.387		579.684.753.965		592.313.027.297		600.005.952.987		609.162.289.888		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					471.740.552.387		447.782.284.965		461.410.558.297		469.753.483.987		477.259.820.888	
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah (Dengan Satuan: Angka)	91,73	91,73	91,74		91,76		91,78		91,80		91,85		Sekretaris
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi sesuai dengan Tahapan dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi Tersusun (Dengan Satuan: Dokumen)	7	12	11		11		11		11		11		Kepala Sub Bagian Program
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Kepala Sub Bagian Program
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	3	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Program

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.01.2. 01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					7.500. 000		7.500. 000		7.500. 000		7.500. 000		7.500. 000	Kepala Sub Bagian Program
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Program
1.02.01.2. 01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD					7.500. 000		7.500. 000		7.500. 000		7.500. 000		7.500. 000	Kepala Sub Bagian Program
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Program
1.02.01.2. 01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					50.000. 000		50.000. 000		50.000. 000		50.000. 000		50.000. 000	Kepala Sub Bagian Program
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	5	5		5		5		5		5		Kepala Sub Bagian Program
1.02.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					147.150. 083.777		148.603. 640.671		150.071. 733.133		151.529. 506.520		153.052. 107.641	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Keuangan
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					141.108.797.460		142.519.885.435		143.945.084.289		145.384.535.132		146.838.380.483	Kepala Sub Bagian Keuangan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/bulan)	1437	1468	1468		1468		1468		1468		1468		Kepala Sub Bagian Keuangan
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					5.966.286.317		6.008.755.236		6.051.648.844		6.094.971.388		6.138.727.158	Kepala Sub Bagian Keuangan
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Keuangan
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					75.000.000		75.000.000		75.000.000		50.000.000		75.000.000	Kepala Sub Bagian Keuangan
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Keuangan
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terpenuhinya Pelaporan BMD Dinkesda secara Tepat Waktu	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					445.000.000		445.000.000		445.000.000		445.000.000		445.000.000	
	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Dinkesda	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1	1	1		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					425.000.000		425.000.000		425.000.000		425.000.000		425.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN		
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	2	5	5		5		5		5		5		5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	0	30	30		30		30		30		30		30	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					535.598.900		535.598.900		535.598.900		535.598.900		535.598.900		
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	11	10	10		10		10		10		10		10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					53.582.700		53.582.700		53.582.700		53.582.700		53.582.700	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN		
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	8	8	8		8		8		8		8		8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					37.645.000		37.645.000		37.645.000		37.645.000		37.645.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	6	6	6		6		6		6		6		6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	6	6	6		6		6		6		6		6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					28.781.200		28.781.200		28.781.200		28.781.200		28.781.200	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	6	6	6		6		6		6		6		6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					11.760.000		11.760.000		11.760.000		11.760.000		11.760.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN		
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan: Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan: Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					336.830.000		336.830.000		336.830.000		336.830.000		336.830.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	59	60	60		60		60		60		60		60	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	30	30	30		30		30		30		30		30	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN		
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1		1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					115.000.000		115.000.000		115.000.000		90.000.000		115.000.000		
	Terlaksananya Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan (Dengan Satuan:Unit)	25	25	25		25		25		25		25		25	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	20	20	20		20		20		20		20		20	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000		50.000.000		50.000.000		40.000.000		50.000.000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	5	5		5		5		5		5		5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					45.000.000		45.000.000		45.000.000		30.000.000		45.000.000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN		
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	2	2		2		2		2		2		2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	2	2		2		2		2		2		2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.709.491.900		2.709.491.900		2.709.491.900		2.709.491.900		2.709.491.900	2.709.491.900	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan: Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					2.662.891.900		2.662.891.900		2.662.891.900		2.662.891.900		2.662.891.900	2.662.891.900	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN		
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		12	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					41.600.000		41.600.000		41.600.000		41.600.000		41.600.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					299.270.000		299.270.000		299.270.000		299.270.000		299.270.000		
	Telaksananya Pemeliharaan BMD	Jumlah BMD yang terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	45	45	45		45		45		45		45		45	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	1	1	1		1		1		1		1		1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kendaraan Dinas Jabatan	Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)													
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	19	19	19		19		19		19		19		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	3	5	5		5		5		5		5		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.270.000		50.270.000		50.270.000		50.270.000		50.270.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	9	9	9		9		9		9		9		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.01.2. 09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.000. 000		50.000. 000		50.000. 000		50.000. 000		50.000. 000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3	3	3		3		3		3		3		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2. 09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000. 000		50.000. 000		50.000. 000		50.000. 000		50.000. 000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	6	6	6		6		6		6		6		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2. 09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					20.000. 000		20.000. 000		20.000. 000		20.000. 000		20.000. 000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	6	6	6		6		6		6		6		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.02.01.2. 10	Peningkatan Pelayanan BLUD					320.381. 107.810		294.969. 283.494		307.129. 464.364		314.039. 616.667		319.998. 352.447	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN		
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Terpenuhinya Pelayanan BLUD	Jumlah Fasyankes yang Melakukan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & PKM) (Dengan Satuan: Unit Kerja)	29	29	29		29		29		29		29		29	Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas
1.02.01.2. 10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					320.381. 107.810		294.969. 283.494		307.129. 464.364		314.039. 616.667		319.998. 352.447	Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Dengan Satuan:Unit Kerja)	29	29	29		29		29		29		29		29	Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					128.252. 825.500		128.852. 825.500		127.852. 825.500		127.202. 825.500		128.852. 825.500		
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Wasting (Dengan Satuan:Persen)	4,04	4,03	4,02		4,01		4,00		3,99		3,98		Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan urusan Pengendalian Penyakit (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	MENINGKATNYA	Persentase Fasilitas	83,52	86,81	90,11		93,41		96,70		98,90		100,00		Kepala	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN		
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (Dengan Satuan:Persen)														Bidang Pelayanan Kesehatan
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Dengan Satuan:Persen)	79,13	80,00	80,10		80,20		80,30		80,40		80,50			Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan Urusan Kesehatan Masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100			Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100			Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun (Dengan Satuan:Persen)	22,50	22,50	22,50		22,50		22,50		22,50		22,50			Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Dengan Satuan:Persen)	NA	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00			Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penemuan Kasus TB (Dengan Satuan:Persen)	85,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Dengan Satuan:Persen)	90,05	93,00	94,00		95,00		96,00		96,00		99,00		Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Depresi yang mendapatkan Layanan pada usia ≥ 15 Tahun (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					35.219.537.892		35.819.537.892		35.819.537.892		35.169.537.892		35.819.537.892	
	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio fasyankes primer dan rujukan per satuan penduduk (Dengan Satuan:Per 10.000 penduduk)	2,4	2,40	2,45		2,51		2,56		2,62		2,68		Ketua Tim Pelayanan Kesehatan Lanjutan
	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen)	NA	74,62	79,83		84,55		85,18		85,36		85,53		Ketua Tim Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	NA	85,00	85,00		86,00		87,00		88,00		88,00		Ketua Tim Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas					8.860.294.000		9.460.294.000		9.460.294.000		8.860.294.000		9.460.294.000	Ketua Tim Tata Kelola Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Tata Kelola Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					18.826.196.000		18.826.196.000		18.826.196.000		18.826.196.000		18.826.196.000	Ketua Tim Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Dengan	26	2	2		2		2		2		2		Ketua Tim Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Satuan: Unit)													Rumah Tangga
1.02.02.2. 01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Ketua Tim Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
1.02.02.2. 01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					7.317.222.892		7.317.222.892		7.317.222.892		7.267.222.892		7.317.222.892	Ketua Tim Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga					90.825.000		90.825.000		90.825.000		90.825.000		90.825.000	Ketua Tim Tata Kelola Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa
	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Dengan Satuan:Keluarga)	441211	296604	296604		296604		296604		296604		296604		Ketua Tim Tata Kelola Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Ketua Tim Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dengan Satuan:Paket)	324	324	324		324		324		324		324		Ketua Tim Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					92.539.0 19.500		92.539.0 19.500		91.539.0 19.500		91.539.0 19.500		92.539.0 19.500	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (Dengan Satuan:Persen)	100	97	97		98		99		99		100		Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lanjut usia yang Mandiri (Dengan Satuan:Persen)	NA	75	77		79		81		83		85		Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sanitasi total berbasis masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	NA	20,08	40,16		60,24		80,32		99,60		100,00		Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (Dengan Satuan:Persen)	NA	18,50	37,00		55,50		74,00		92,50		99,90		Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					2.661.926.000		2.661.926.000		2.661.926.000		2.661.926.000		2.661.926.000	Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	17999	16513	16383		16170		16170		16170		16170		Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					127.800.000		127.800.000		127.800.000		127.800.000		127.800.000	Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	16430	16513	16383		16170		16170		16170		16170		Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					244.981.600		244.981.600		244.981.600		244.981.600		244.981.600	Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	16491	15727	15603		15400		15400		15400		15400		Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2. 02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					45.000.0 00		45.000.0 00		45.000.0 00		45.000. 000		45.000.0 00	Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	76803	78953	80210		81345		81345		81345		81345		Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi
1.02.02.2. 02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.282.54 6.000		1.282.54 6.000		1.282.54 6.000		1.282.5 46.000		1.282.54 6.000	Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	179360	176588	176588		176588		176588		176588		176588		Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.02.2. 02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					1.745.91 8.400		1.745.91 8.400		1.245.91 8.400		1.245.9 18.400		1.745.91 8.400	Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	778298	822231	822231		822231		822231		822231		822231		Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2. 02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					46.100. 000		46.100. 000		46.100. 000		46.100. 000		46.100. 000	Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yg M endapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan: Orang)	226130	135238	133581		134129		134677		135225		135773		Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi
1.02.02.2. 02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					50.000. 000		50.000. 000		50.000. 000		50.000. 000		50.000. 000	Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	309979	309414	262261		300167		288198		276230		264261		Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
1.02.02.2. 02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					550.200. 000		550.200. 000		450.200. 000		450.200. .000		550.200. 000	Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	19314	19079	19079		19079		19079		19079		19079		Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2. 02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					348.550. 000		348.550. 000		348.550. 000		348.550. .000		348.550. 000	Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	2596	2510	2596		2600		2650		2669		2700		Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
1.02.02.2. 02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					1.675.40 0.000		1.675.40 0.000		1.475.40 0.000		1.475.40 0.000		1.675.40 0.000	Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	17900	12290	11059		9531		8440		7610		6968		Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
1.02.02.2. 02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					610.770. 100		610.770. 100		410.770. 100		410.770. .100		610.770. 100	Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															Penyehatan Lingkungan
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	24498	20421	21958		20021		19797		19626		19494		Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					5.830.540.000		5.830.540.000		5.830.540.000		5.830.540.000		5.830.540.000	Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2. 02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					252.552. 600		252.552. 600		252.552. 600		252.552. .600		252.552. 600	Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.02.2. 02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					534.960. 000		534.960. 000		534.960. 000		534.960. .000		534.960. 000	Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dengan Satuan: Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
1.02.02.2. 02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					433.492. 600		433.492. 600		433.492. 600		433.492. .600		433.492. 600	Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					562.172.000		562.172.000		562.172.000		562.172.000		562.172.000	Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					85.730.000		85.730.000		85.730.000		85.730.000		85.730.000	Ketua Tim Tata Kelola Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Dengan Satuan: Orang)	NA	1000	1000		1240		1305		1387		1632		Ketua Tim Tata Kelola Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Ketua Tim Tata Kelola Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Dengan Satuan:Orang)	27	27	27		27		27		27		27		Ketua Tim Tata Kelola Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					3.644.238.000		3.644.238.000		3.644.238.000		3.644.238.000		3.644.238.000	Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2. 02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					62.993.021.200		62.993.021.200		62.993.021.200		62.993.021.200		62.993.021.200	Ketua Tim Pengelolaan Pendanaan Kesehatan
	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Pengelolaan Pendanaan Kesehatan
1.02.02.2. 02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional					52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000	Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi
	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Dengan Satuan: Paket)	40	40	40		40		40		40		40		Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi
1.02.02.2. 02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan					125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Ketua Tim Pelayanan Kesehatan Lanjutan
	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	29	29	29		29		29		29		29		Ketua Tim Pelayanan Kesehatan Lanjutan

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Berkualitas (Dengan Satuan:Unit)													
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					4.558.881.000		4.558.881.000		4.558.881.000		4.558.881.000		4.558.881.000	Kepala Puskesmas
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Puskesmas
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					368.981.000		368.981.000		368.981.000		368.981.000		368.981.000	Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Ketua Tim Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan
	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)	29	80	80		85		85		88		88		Ketua Tim Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					18.150.000		18.150.000		18.150.000		18.150.000		18.150.000	Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Dengan Satuan: Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi
	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Ketua Tim Pelayanan Kesehatan Primer
	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Pelayanan Kesehatan Primer

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2. 02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					86.750.000		86.750.000		86.750.000		86.750.000		86.750.000	Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:Orang)	2223	2651	2276		1961		1737		1566		1434		Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
1.02.02.2. 02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					42.200.000		42.200.000		42.200.000		42.200.000		42.200.000	Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:Orang)	164	122	100		75		50		25		0		Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2. 02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					36.800.000		36.800.000		36.800.000		36.800.000		36.800.000	Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Dengan Satuan: Orang)	19	19	19		20		20		20		20		Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
1.02.02.2. 02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Dengan Satuan: Tatanan)	3	3	3		3		3		3		3		Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.02.2. 02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					627.969.000		627.969.000		627.969.000		627.969.000		627.969.000	Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dengan	1	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Satuan:Dokumen)													
1.02.02.2. 02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					1.157.56 0.000		1.157.56 0.000		1.157.56 0.000		1.157.5 60.000		1.157.56 0.000	Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi
1.02.02.2. 02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					351.500. 000		351.500. 000		351.500. 000		351.500 .000		351.500. 000	Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi
1.02.02.2. 02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi					707.330. 000		707.330. 000		707.330. 000		707.330 .000		707.330. 000	Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi
1.02.02.2. 02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji					70.000. 000		70.000. 000		70.000. 000		70.000. 000		70.000. 000	Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2. 03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					159.268. 108		159.268. 108		159.268. 108		159.268. .108		159.268. 108	
	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Dengan Satuan: Persen)	NA	67	71		74		76		78		80		Ketua Tim Tata Kelola Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa
1.02.02.2. 03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					159.268. 108		159.268. 108		159.268. 108		159.268. .108		159.268. 108	Ketua Tim Tata Kelola Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Tata Kelola Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa
1.02.02.2. 04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					335.000. 000		335.000. 000		335.000. 000		335.000. .000		335.000. 000	
	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Rumah Sakit Berbasis Kompetensi atau kemampuan Pelayanan (Dengan Satuan: Rumah Sakit)	5	6	6		6		6		6		6		Ketua Tim Pelayanan Kesehatan Lanjutan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kabupaten/Kota														
1.02.02.2. 04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Ketua Tim Pelayanan Kesehatan Lanjutan
	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	5	6	6		6		6		6		6		Ketua Tim Pelayanan Kesehatan Lanjutan
1.02.02.2. 04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Ketua Tim Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan
	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Dengan Satuan:Unit)	5	89	89		89		89		89		89		Ketua Tim Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2. 04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan					95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000	Ketua Tim Pelayanan Kesehatan Lanjutan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN		
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dengan Satuan: Dokumen)	5	6	6		6		6		6		6		6	Ketua Tim Pelayanan Kesehatan Lanjutan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.321.63 9.500		1.321.63 9.500		1.321.63 9.500		1.321.6 39.500		1.321.63 9.500		
	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan dan pelayanan fasilitas	Persentase tenaga kesehatan berkompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		100	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan dan pelayanan fasilitas	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap Populasi (Dengan Satuan:Angka)	1,94	1,94	1,98		2,00		2,02		2,04		2,06		2,06	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
1.02.03.2. 01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota					40.000. 000		40.000. 000		40.000. 000		40.000. 000		40.000. 000		
	Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase nakes mendapat rekomendasi ijin praktik (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		100	Ketua Tim Tata Kelola Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.03.2. 01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik					20.000. 000		20.000. 000		20.000. 000		20.000. 000		20.000. 000		Ketua Tim Tata Kelola

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN		
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Tenaga Kesehatan															Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		1	Ketua Tim Tata Kelola Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		Ketua Tim Tata Kelola Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dengan Satuan: Dokumen)	2		2		2		2		2		2		2	Ketua Tim Tata Kelola Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					112.624.000		112.624.000		112.624.000		112.624.000		112.624.000		

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SDMk sesuai standar (Persentase faskes yg terpenuhi named dan nakes sesuai standar) (Dengan Satuan:Persen)	87	100	100		100		100		100		100		Ketua Tim Tata Kelola Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Ketua Tim Tata Kelola Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.03.2. 02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan					20.000. 000		20.000. 000		20.000. 000		20.000. 000		20.000. 000	Ketua Tim Tata Kelola Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dengan Satuan: Dokumen)	1	2	2		2		2		2		2		Ketua Tim Tata Kelola Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.03.2. 02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					30.000. 000		30.000. 000		30.000. 000		30.000. 000		30.000. 000	Ketua Tim Tata Kelola Sumber Daya Manusia Kesehatan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Dengan Satuan:Orang)	850	850	850		850		850		850		950		Ketua Tim Tata Kelola Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					62.624.000		62.624.000		62.624.000		62.624.000		62.624.000	Ketua Tim Tata Kelola Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Satuan:Dokumen)	1	2	2		2		2		2		2		Ketua Tim Tata Kelola Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					1.169.015.500		1.169.015.500		1.169.015.500		1.169.015.500		1.169.015.500	
	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) memiliki kompetensi teknis (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Ketua Tim Tata Kelola Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia					1.169.015.500		1.169.015.500		1.169.015.500		1.169.015.500		1.169.015.500	Ketua Tim Tata Kelola Sumber Daya Manusia

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota														Kesehatan
	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupatn/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Dengan Satuan:Orang)	350	170	170		170		170		170		170		Ketua Tim Tata Kelola Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					721.239.000		721.239.000		721.239.000		721.239.000		721.239.000	
	Meningkatnya jaminan keamanan, kualitas ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan serta sarana produksi makanan dan minuman sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Meningkatnya jaminan keamanan, kualitas ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen)	NA	83	85		88		92		95		96		Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Meningkatnya jaminan keamanan, kualitas ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN		
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Persen)														
1.02.04.2. 01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					124.000. 000		124.000. 000		124.000. 000		124.000. .000		124.000. 000		
	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		100	Ketua Tim Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek dan toko Obat yang Mampu memelihara persyaratan Perizinan (Dengan Satuan:Persen)	NA	100	100		100		100		100		100		100	Ketua Tim Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
1.02.04.2. 01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha					124.000. 000		124.000. 000		124.000. 000		124.000. .000		124.000. 000		Ketua Tim Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Mikro Obat Tradisional (UMOT)														Rumah Tangga
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dengan Satuan:Dokumen)	40		40		40		40		40		40		Ketua Tim Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					597.239.000		597.239.000		597.239.000		597.239.000		597.239.000	
	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat	Persentase Rekomendasi Sertifikat Produksi P-IRT (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Ketua Tim Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN		
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga															
	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	NA	100	100		100		100		100		100			Ketua Tim Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan Bermutu (Dengan Satuan:Persen)	69,81	75	76		77		78		79		80			Ketua Tim Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tangga Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	57	54	58		62		66		70		74		Ketua Tim Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
1.02.04.2. 03.0001						597.239. 000		597.239. 000		597.239. 000		597.239. 000		597.239. 000	Ketua Tim Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN		
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dengan Satuan:Dokumen)	100	100	100		100		100		100		100			Ketua Tim Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.006.76 5.000		1.006.76 5.000		1.006.76 5.000		1.006.7 65.000		1.006.76 5.000		
	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam promosi Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) (Dengan Satuan:Persen)	93,55	93,55	93,55		93,55		93,55		93,55		93,55			Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam promosi Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup (Dengan Satuan:Persen)	NA	30	35		40		45		50		55			Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.05.2. 01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					400.000. 000		400.000. 000		400.000. 000		400.000. .000		400.000. 000	
	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat (Dengan Satuan:Mitra)	10	10	10		10		10		10		10		Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdaya- an Masyarakat
1.02.05.2. 01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					400.000. 000		400.000. 000		400.000. 000		400.000. .000		400.000. 000	Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdaya- an Masyarakat
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.05.2. 02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	
	Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (Dengan Satuan:Rumah Tangga)	337479	337479	337479		337479		337479		337479		337479		Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (Dengan Satuan:Persen)	NA	35,00	34,90		34,80		34,70		34,60		34,50		Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2. 02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.05.2. 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					486.765.000		486.765.000		486.765.000		486.765.000		486.765.000	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif Bidang Kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	99,69	99,70	99,70		99,70		99,70		99,70		99,70		Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2. 03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					486.765.000		486.765.000		486.765.000		486.765.000		486.765.000	Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Ketua Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Daerah yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Usia Harapan Hidup(UHH)	Tahun	75,79	75,91	76,08	76,30	76,59	77,11	77,43	
2	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	8	12	12	11	11	10	10	
3	Jumlah Kematian Balita	Kasus	146	146	145	145	144	144	143	
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	10,00	7,50	7,32	7,14	6,95	6,77	6,59	
5	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	Angka	NA	66,67	66,67	70,37	74,07	77,78	81,48	
6	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	Angka	NA	18,51	25,92	33,33	37,63	40,74	44,44	
7	Indeks Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah	Angka	4,60	4,62	4,66	4,71	4,76	4,81	4,85	
8	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Daerah	Angka	84,00	84,10	84,20	84,30	84,40	84,50	84,60	

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Demak

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Per 1.000 Penduduk	0,930	0,917	1,054	1,123	1,204	1,195	1,248	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi RPJMD Kabupaten Demak untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Kesehatan. Renstra Dinas Kesehatan Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Permasalahan pembangunan urusan Kesehatan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Kesehatan Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Kesehatan Daerah. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perlu dilakukan pula penggalangan komitmen dan kerjasama dengan *stakeholder*, termasuk perguruan tinggi, masyarakat, media maupun dunia usaha dalam melaksanakan Renstra ini. Semoga Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera.

**LAMPIRAN DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025-2029**

Pada bagian ini dijabarkan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029. Setiap indikator dilengkapi dengan level indikator, nama indikator, satuan, definisi operasional, formulasi perhitungan, jadwal rilis, serta instansi perilis. Penjabaran masing-masing indikator disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Definisi Operasional

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Usia Harapan Hidup (UHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.	Perhitungan Usia harapan hidup (UHH) sangat bergantung pada data kematian dalam tabel kematian dan mengikuti prosedur yang ditentukan dalam <i>metode life table (BPS)</i>	Akhir Semester 2	Dinkesda
2	Sasaran 1: Menurunnya Kematian dan Kesakitan	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	Jumlah kematian perempuan akibat sebab apapun yang berkaitan dengan atau diperburuk oleh kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk sebab kecelakaan atau insidental), yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah kehamilan berakhir tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
3		Jumlah Kematian Balita	Kasus	Kasus Kematian Anak usia 0-59 bulan dalam satu tahun	Jumlah kematian anak berusia 0-59 bulan dalam satu periode tertentu	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
4		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	Proporsi anak dibawah usia lima tahun yang memiliki tinggi badan dibawah standart tinggi badan usia mereka, berdasarkan indeks tinggi badan per usia yang diukur menggunakan standar pertumbuhan anak dari WHO	Angka yang menunjukkan anak stunting dalam satu periode tertentu Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) atau Survei Kesehatan Indonesia (SKI)	Tahun Berikutnya	Dinkesda
5		Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	Angka	Persentase puskesmas dengan proporsi non Hipertensi minimal 75 %, proporsi non Diabetes Militus minimal 85%, dan memiliki peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Jumlah Puskesmas dengan proporsi non Hipertensi minimal 75 %, proporsi non Diabetes Militus minimal 85%, dan memiliki peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dibagi 27 Puskesmas dikali 100	Akhir Tahun	Dinkesda
6		Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	Angka	Puskesmas yang memenuhi keberhasilan pengobatan TB >90%, Penemuan TB > 90%, eradikasi frambusia, dan eliminasi malaria	Puskesmas yang memenuhi komponen; keberhasilan pengobatan TB > 90%, Penemuan TB >90%, eradikasi frambusia, dan eliminasi malaria dibagi 27 Puskesmas dikali 100	Akhir Tahun	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Wasting (Satuan: Persen)	Persen	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan Z-score kurang dari -2SD.	Jumlah balita Wasting dalam satu tahun dibagi jumlah seluruh balita dalam satu tahun dikali 100	Tahun Berikutnya	Dinkesda
8	Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan urusan Kesehatan Masyarakat	Persen	Masyarakat (SPM bidang Kesehatan Masyarakat didalamnya mencakup Pelayanan kesehatan ibu Hamil, Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan Kesehatan ODGJ berat, dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut) adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan Masyarakat yang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.	Jumlah total capaian SPM Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai standar disuatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah total jenis SPM Bidang Kesehatan Masyarakat di wilayah tersebut dalam kurun waktu yang sama dikali 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
9		Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan urusan Pengendalian Penyakit	Persen	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pengendalian Penyakit (SPM bidang pengendalian penyakit didalamnya mencakup Pelayanan kesehatan usia produktif, Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis, dan pelayanan kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi virus HIV) adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan Pengendalian Penyakit yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.	Jumlah total capaian SPM Bidang Pengendalian penyakit sesuai standar disuatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah total jenis layanan SPM Bidang Pengendalian Penyakit di wilayah tersebut dalam kurun waktu yang sama dikali 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
10		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persen	Proporsi Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, dan Labkes) dengan Akreditasi Paripurna	Jumlah Faskes (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan Labkes) yang mendapatkan status akreditasi paripurna dan masih berlaku dalam kurun waktu 2025-2029 dibagi jumlah fasilitas kesehatan yang teregistrasi dikali 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
11		Cakupan kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	Persentase penduduk yang memiliki status kepesertaan aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu peserta yang membayar iuran secara rutin atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah, sehingga berhak memperoleh manfaat layanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS kesehatan	Jumlah peserta JKN yang status kepesertaannya aktif (membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah) dibandingkan dengan total jumlah penduduk pada periode tertentu dikali 100.	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
12		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	Jumlah Orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapat pelayanan Kesehatan usia produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran yang dilayani dibagi sasaran dikali 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
		sesuai standar					
13		Prevalensi Obesitas > 18 tahun	Persen	Persentase Jumlah Penduduk Umur >18 Tahun dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥ 27 pada Wilayah dan Periode waktu tertentu	Jumlah Penduduk Umur >18 Tahun dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥ 27 , dibagi dengan Jumlah Penduduk Umur >18 Dikali 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
14		Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	Persentase seluruh kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis	Jumlah seluruh kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis di bagi jumlah data sasaran yang terdaftar dikali 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
15		Persentase Depresi yang mendapatkan Layanan pada usia ≥ 15 Tahun	Persen	Persentase penduduk usia ≥ 15 Tahun dengan depresi yang mendapat layanan sesuai standar yang tercantum dalam Panduan Praktik Klinik (konseling, tata laksana hingga rujukan) di Puskesmas	Penduduk usia ≥ 15 Tahun dengan depresi yang mendapat layanan sesuai standar, dibagi estimasi penderita depresi, dikali 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
16		Cakupan Penemuan Kasus TB	Persen	Menemukan pasien TB melalui serangkaian kegiatan mulai dari penjarangan terhadap terduga pasien TB, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, menentukan diagnosis, menentukan klasifikasi penyakit serta tipe pasien TB	Jumlah Kasus TB resisten obat yang terkonfirmasi resisten terhadap rifampisin (RR) dan atau TB-MDR ditambah TB Sensitif Obat dibagi Perkiraan kasus TB resisten obat dan Perkiraan kasus TB sensitif obat dikali 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
17		Angka Keberhasilan Pengobatan TB	Persen	Jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan.	Penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus dibagi semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan dikali 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
18	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio fasyankes primer dan rujukan per satuan penduduk	Per 10.000 Penduduk	perbandingan antara jumlah fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang tersedia dengan jumlah penduduk di suatu wilayah	jumlah fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang tersedia dengan jumlah penduduk di suatu wilayah di kali 10.000 penduduk	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
19		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar adalah Pustu, Puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Standar Puskesmas: 1. Puskesmas & Pustu melayani kurang dari atau sama dengan 30.000 penduduk dengan waktu tempuh maksimal 120 menit untuk daerah terjauh. 2. Puskesmas memiliki 9 tenaga medis/tenaga Kesehatan strategis, 3. Puskesmas memiliki SPA minimal 60% standar 4. Puskesmas memiliki 90% dari 40 jenis obat esensial dan 7	Rata-rata Persentase Skor fasyankes Pemerintah yang memenuhi komponen sesuai standar dibagi Fasyankes Pemerintah	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
				<p>jenis vaksinImunisasi Rutin Lengkap (IRL) 5.Desesa/Kelurahan memiliki Pustusesuai standar ILP. Pustusesuai standar ILP: Pelayanan minimal kluster 2 (ibu & anak) dan kluster 3 (dewasa & lansia);Tenaga 2 Nakes (Bidan & Perawat) dan 2 Kader; Terdapat ruang pelayanan & pemberdayaan. 5. RME terintegrasi ke SIKN. Standar RS: 1.RSUD dengan Klasifikasi madya pada kelompok layanan rumah sakit berbasis kompetensi/ kemampuan pelayanan 2. Memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang, 3. Memiliki SPA minimal 80% sesuai standar 4. Memiliki 80% obat sesuai Formularium Nasional 5. RME terintegrasi ke SIKN</p>			
20		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Persen	Mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam bentuk feedback dan survey terhadap Pelayanan Kesehatan Oleh Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Lanjutan (RS dan Klinik Utama)	Total Nilai Persepsi (Indeks Kepuasan Pasien) dari masing-masing fasyankes (Puskesmas, RS, dan Klinik Utama) yang telah diboboti sesuai jumlah masing-masing fasyankes yang dievaluasi terkait Indeks Kepuasan Pasien dibagi Total Seluruh Fasyankes yang dievaluasi nilai Indeks Kepuasan Pasiennya, Dikali 100	Semester I dan Semester II	Dinkesda
21	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
22	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
23	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
27	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lanjut usia yang mandiri	Persen	Persentase lansia ≥ 60 Tahun yang masih mampu melakukan aktifitas hidup sehari-hari tanpa bantuan sama sekali dari Orang lain (mandiri: skor ADL 20) dan lansia yang mengalami gangguan dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari hingga kadang perlu bantuan Orang lain (skor ADL 12-19/ ketergantungan ringan)	Jumlah lansia ≥ 60 Tahun (Skor ADL 20) ditambah jumlah lansia > 60 Tahun dengan ketergantungan ringan (Skor ADL 12-19) dibagi jumlah lansia yang diskruining dikali 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
28		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	Persentase Bayi (0-11 Bulan) yang mendapatkan imunisasi lengkap di suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi lengkap di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi target bayi (0-11 bulan) dalam waktu yang sama dikali 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
29		Persentase Desa/ Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Persen	Desa/kelurahan yang telah terverifikasi 100 % KK Stop Buang Air Besar Sembarangan di Tempat terbuka dan minimal 75 % KK berperilaku minimal 3 Pilar STBM lainnya	Jumlah desa/kelurahan yang telah terverifikasi 100 % KK Stop Buang Air Besar Sembarangan di Tempat terbuka dan minimal 75 % KK berperilaku minimal 3 Pilar STBM lainnya dibagi seluruh desa/kelurahan di wilayah kab/kota di kali 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
30		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Persen	Puskesmas dengan 70% Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat pengelolaan pangan meliputi hasil inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) minimal 80, peningkatan kapasitas penjamah pangan, dan pemeriksaan pangan	Jumlah Puskesmas dengan 70% TPP yang memenuhi syarat pengelolaan pangan meliputi hasil IKL min 80, peningkatan kapasitas penjamah pangan dan pemeriksaan pangan dibagi jumlah Puskesmas dikali 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Triwulan III dan IV	Dinkesda
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Akhir Tahun	Dinkesda
44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Akhir Tahun	Dinkesda
45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Akhir Tahun	Dinkesda
46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Akhir Tahun	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Akhir Tahun	Dinkesda
48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiridan Tradisional Lainnya	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiridan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiridan Tradisional Lainnya	Akhir Tahun	Dinkesda
49	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Akhir Tahun	Dinkesda
50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalah-guna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
52	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Akhir Tahun	Dinkesda
53	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Akhir Tahun	Dinkesda
54	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	Paket	Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
55	Penyediaan Telemedicine di	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	(Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		
56	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Akhir Tahun	Dinkesda
57	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Akhir Tahun	Dinkesda
58	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Akhir Tahun	Dinkesda
59	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Akhir Tahun	Dinkesda
60	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
61	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Akhir Tahun	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
62	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
63	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
64	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan malaria	Orang	Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan malaria (Satuan:Orang)	Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan malaria (Satuan:Orang)	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
65	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Tatanan	Tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Akhir Tahun	Dinkesda
67	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	Dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
68	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Dokumen	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Akhir Tahun	Dinkesda
69	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Akhir Tahun	Dinkesda
70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Akhir Tahun	Dinkesda
71	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Persen	Persentase Fasyankes (RS, PKM, Klinik, Labkes, TPMD/DG) yang terkoneksi dengan aktif mengirimkan data dalam sistem informasi kesehatan nasional. Unit Populasi : Total Seluruh Faskes (Tanpa Apotek)	Jumlah Fasyankes yang terintegrasi dan mengirimkan datanya ke SIKN/ Jumlah total fasilitas Kesehatan yang terkoneksi dengan API dikali 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
72	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Akhir Tahun	Dinkesda
73	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Sakit Berbasis Kompetensi atau kemampuan Pelayanan	Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Berbasis Kompetensi atau kemampuan Pelayanan yang Dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Berbasis Kompetensi atau kemampuan Pelayanan yang Dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
74	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
75	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
76	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Akhir Tahun	Dinkesda
77	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga Kesehatan berkompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	Tenaga kesehatan adalah tenaga medis dan non medis yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan bidang kesehatan dan telah memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) yang diberikan oleh pemerintah kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi dalam suatu fasyankes dibagi dengan jumlah total tenaga kesehatan yang bekerja di fasyankes tersebut dalam kurun waktu satu tahun, kemudian dikalikan 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
78		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1.000)	Angka	Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang tersedia terhadap jumlah penduduk	Jumlah Named dan Nakes (Dokter, Perawat, Bidan) yang terdata dibagi total populasi dikali 1.000	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
79	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase nakes Mendapat rekomendasi ijin praktik	Persen	Tenaga kesehatan adalah Orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan formal di bidang kesehatan. Mereka termasuk dokter, perawat, bidan, apoteker, dan berbagai tenaga profesional lainnya yang memberikan pelayanan kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang direkomendasikan ijin praktek di bagi jumlah tenaga kesehatan yang mengajukan rekomendasi ijin praktek di kali 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
80	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Akhir Tahun	Dinkesda
81	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Akhir Tahun	Dinkesda
82	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (Persentase faskes yg terpenuhi named dan nakes sesuai standar)	Persen	Persentase Puskesmas Terintegrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal jenis dan jumlah SDMK berdasarkan lingkup pelayanan fasyankes (rawat inap dan non-rawat inap) dan klasifikasi wilayah (perkotaan dan non perkotaan) untuk RPJMN 2025-2029. Kriteria Puskesmas dengan SDMK memenuhi standar : 1. Puskesmas non rawat inap : Minimal terdapat masing-masing 1 dokter yg memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer/dokter, dokter gigi/terapis gigi dan mulut, perawat, bidan, nutrisisionis, sanitasi lingkungan/ tenaga kesmas, tenaga sistem informasi kesehatan/ perekam medis, tenaga administrasi keuangan/ketatausahaan. 2. Puskesmas rawat inap wilayah perkotaan : minimal terdapat 3 dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga, layanan primer/dokter, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi, apoteker/Tenaga kefarmasian, tenaga teknologi laboratorium medik, nutrisisionis, tenaga promkes dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, terapis gigi dan mulut, tenaga sistem informasi kesehatan/perekam medis, tenaga administrasi keuangan/ketatausahaan. 3. Puskesmas Rawat Inap di Wilayah non-perkotaan (pedesaan, terpencil, sangat terpencil) : Minimal terdapat 2	Jumlah PKM teregistrasi dan laik operasional sesuai kategori lingkup pelayanan fasyankes dan klasifikasi wilayah yang memenuhi standar kriteria yang ditentukan, dibagi total puskesmas teregistrasi dan laik operasional pada tahun baseline, lalu dikalikan 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
				dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer/dokter, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi/terapis gigi dan mulut, apoteker/tenaga kefarmasian, tenaga teknologi laboratorium medik, nutrisisionis, tenaga promkes dan ilmu perilaku/ tenaga kesmas, tenaga sanitasi lingkungan/ tenaga kesmas, tenaga sistem informasi kesehatan/ perekam medis, tenaga administrasi keuangan/ketatausahaan.			
83		Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persen	Persentase RS milik Pemerintah Pusat dan Daerah teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal 7 jenis dokter spesialis (Sp.A, Sp.B, Sp.OG, Sp.PD, Sp.An, Sp.Rad, Sp.PK) dan minimal 1 jenis dokter spesialis layanan unggulan tambahan sesuai dengan jenis pelayanan unggulan pada RS pengampu Pelayanan KJSU-KIA.	Jumlah RS Teregistrasi dan laik operasional memenuhi standar kriteria yang ditentukan, dibagi total RS teregistrasi dan laik operasional pada tahun baseline, lalu dikalikan 100%	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
84	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Akhir Tahun	Dinkesda
85	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
86	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Akhir Tahun	Dinkesda
87	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) memiliki Kompetensi teknis	Persen	Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) memiliki kompetensi teknis dalam pelayanan kesehatan. Kompetensi teknis mencakup penguasaan keterampilan klinis, seperti diagnosis, perawatan, dan penggunaan teknologi medis. Selain itu, SDMK juga dituntut memiliki keterampilan komunikasi, kerja tim, dan etika yang baik	Persentase Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) memiliki Kompetensi teknis	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
88	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
89	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan serta sarana produksi Makanan dan minuman sesuai ketentuan	Persen	Sarana pelayanan kefarmasian adalah tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker, Sarana pelayanan Alat kesehatan Unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran, sarana produksi makanan dan minuman adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan serta sarana produksi makanan dan minuman yang memenuhi ketentuan dibagi dengan jumlah sarana yang dilakukan pembinaan pengawasan dalam satu tahun dikalikan 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
90		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persen	Persentase Fasyankes (PKM, termasuk Labkes, RS) yang secara konsisten mempertahankan tingkat kecukupan pasokan kesehatan esensial, termasuk diagnostik, reagen, obat-obatan, vaksin, sesuai dengan pedoman untuk memenuhi kebutuhan pasien dan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu	Jumlah Faskes dengan perbekalan kesehatan yang memadai sesuai standar/ Jumlah Total Fasilitas Kesehatan dikali 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
91		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persen	<ul style="list-style-type: none"> • Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. • Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan • Rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan adalah rekomendasi dari lintas sektor berupa tindak lanjut dari hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan • Lintas sektor : <ul style="list-style-type: none"> • Sediaan farmasi meliputi Kementerian Kesehatan, BPOM, BKKBN, dan Kementerian Perdagangan • Pangan Olahan meliputi BPOM dan Pemda lainnya • Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah provinsi dan 	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dihitung menggunakan rumus: $a = \text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti Pemda}$ $b = \text{jumlah rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor}$ $(a)/(b) \times 100\%$	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
				<p>kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah rekomendasi hasil pengawasan adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan dari lintas sektor yang diterima pada tahun berjalan Jumlah yang ditindaklanjuti adalah Jumlah tindaklanjut dari rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah diterbitkan pada tahun berjalan 			
92	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi Perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persen	<p>Persentase Rekomendasi Perijinan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau cakupan pemberian rekomendasi oleh Dinas Kesehatan terhadap permohonan perizinan usaha di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apotek 2. Toko Obat 3. Toko Alat Kesehatan 4. Optikal 5. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan Rekomendasi Perizinan dibagi Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan Rekomendasi Perizinan dikali 100	Triwulan II, III, dan IV	Dinkesda
93		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Sarana apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan adalah sarana yang berhasil memenuhi dan mempertahankan persyaratan perizinan sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan Permenkes yang terkait dengan perizinan berusaha apotek dan toko obat Jangka waktu tertentu adalah batasan waktu dari sarana yang menjadi target diperiksa yaitu sarana yang izinnya diterbitkan antara 1 s.d 2 Tahun dan atau 4- 5 Tahun 	<p>Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan dihitung menggunakan rumus:</p> <p>A = Jumlah apotek dan toko obat yang memenuhi seluruh persyaratan perizinan</p> <p>B = Jumlah total apotek dan toko obat di wilayah kerja pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi target pemeriksaan (sesuai jangka waktu tertentu)</p> <p>$(a)/(b) \times 100\%$</p>	Triwulan II, III, dan IV	Dinkesda
94	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Akhir Tahun	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
95	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Rekomendasi Sertifikat Produksi P-IRT	Persen	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah izin edar yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah memenuhi persyaratan untuk memproduksi dan memasarkan produk pangan mereka. SPP-IRT ini menjamin bahwa produk pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi dan diproduksi sesuai dengan standar yang ditetapkan.	Jumlah sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) direkomendasi sertifikat P-IRT dibagi jumlah seluruh sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang mengajukan Sertifikat Produksi P-IRT dikali 100	Triwulan II, III, dan IV	Dinkesda
96		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan Pangan manual hingga semi otomatis. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP-IRT adalah legalitas yang diberikan kepada IRTP untuk memproduksi dan mengedarkan PIRT. Sesuai standar adalah kesesuaian penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT dengan persyaratan minimal yang ditetapkan, berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan SPP-IRT. Persyaratan minimal yang ditetapkan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian produk yang memperoleh SPP-IRT yang dibuktikan melalui konfirmasi produk pada aplikasi SPPIRT. Adanya pemenuhan komitmen SPP-IRT yang dibuktikan dengan verifikasi pemenuhan komitmen pada aplikasi sppirt.pom.go.id yang meliputi pemenuhan komitmen terhadap Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), CPPB-IRT, dan label. Pengampu indikator Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan BPOM sebagai koordinator. 	<p>1. Kesesuaian produk yang memperoleh SPPIRT yang dibuktikan melalui konfirmasi produk pada aplikasi SPPIRT (X): $X = (\text{Jumlah produk yang diverifikasi pada aplikasi sppirt.pom.go.id} / \text{Jumlah SPP-IRT terbit melalui sistem OSS}) \times 100\%$</p> <p>2. Adanya pemenuhan komitmen SPPIRT yang dibuktikan dengan verifikasi pemenuhan komitmen pada aplikasi sppirt.pom.go.id yang meliputi pemenuhan komitmen terhadap Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), CPPB-IRT, dan label (Y): $Y1 = \text{Verifikasi pemenuhan komitmen Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)} / (\text{Jumlah verifikasi pemenuhan komitmen PKP} / \text{Jumlah pelaku usaha}) \times 100\%$ $Y2 = \text{Verifikasi pemenuhan komitmen CPPBIRT} / (\text{Jumlah verifikasi pemenuhan komitmen CPPBIRT} / \text{Jumlah SPPIRT terbit}) \times 100\%$ $Y3 = \text{Verifikasi pemenuhan komitmen label} / (\text{Jumlah verifikasi pemenuhan komitmen label} / \text{Jumlah SPPIRT terbit}) \times 100\%$ $Y = (Y1 + Y2 + Y3) / 3$</p> <p>Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (Z): $Z = (X + Y) / 2$</p>	Triwulan II, III, dan IV	Dinkesda
97		Persentase pangan	Persen	1. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan	Kriteria Pangan Tidak Aman dan Bermutu adalah	Triwulan II,	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
		industri rumah tangga aman dan bermutu		<p>olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.</p> <p>2.Sampling dilakukan di sarana peredaran pangan meliputi gudang distributor, hypermarket, supermarket/swalayan, toko, warung, kantin sekolah dan kantin/warung/toko di sekitar sekolah, kios, pasar tradisional, apotek, toko obat, dan lain-lain</p> <p>3.Sampling dan pengujian PIRT dapat dilakukan terhadap jenis pangan olahan PIRT terdaftar yang diproduksi dalam wilayah kabupaten/kota atau dari luar kabupaten/kota namun beredar dalam wilayah kabupaten/kota tersebut</p> <p>4.Sampling dan pengujian PIRT juga dapat dilakukan di sarana produksi dan/atau peredaran, apabila terdapat perkembangan isu keamanan pangan.</p> <p>a. Potensi/kasus pelanggaran/masalah pangan. b. Pengaduan masyarakat. c. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP). d. Emerging issue yang perlu ditindaklanjuti sebagai dasar kebijakan. e. Tujuan lain yang dianggap perlu berdasarkan hasil kajian risiko.</p> <p>5.Terhadap sampel PIRT dilakukan pemeriksaan terhadap:</p> <p>a. Nomor SPP-IRT b. Produk kedaluwarsa c. Produk rusak d. Penandaan produk e. Pengujian produk.</p> <p>6.Alur pemeriksaan hasil sampling PIRT dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 5.a hingga poin 5.e. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 5.a akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 5.b dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.c (pemeriksaan awal). Apabila pemeriksaan awal sesuai maka akan dilanjutkan ke kriteria point 5.d dan 5.e. Proses tersebut dapat digambarkan sebagaimana alur</p>	<p>pangan TIE, pangan kedaluwarsa, pangan rusak dan pangan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Cara Perhitungan dan Formulasi: % PIRT Tidak Aman dan Bermutu = (Sampel PIRT TIE + PIRT rusak + PIRT kedaluwarsa + TMS Pengujian) dibagi Total sampel PIRT × 100% % PIRT Aman dan Bermutu = 100% - % PIRT Tidak Aman dan Bermutu</p>	III,dan IV	
98		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan Pangan manual hingga semi otomatis. IRTP Memenuhi Ketentuan (MK) adalah IRTP yang 	<p>Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan dihitung menggunakan rumus:</p> <p>a = Jumlah IRTP yang MK b = Jumlah IRTP yang diperiksa berdasarkan target pemeriksaan (a)/(b) x 100%</p>	Triwulan II, III,dan IV	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
				memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPOB IRTP) pada saat pemeriksaan oleh Pemda Kab/Kota.			
99	<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	<i>Dokumen</i>	<i>Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	<i>Akhir Tahun</i>	<i>Dinkesda</i>
100	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentasi rumah Tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat)	Persen	PHBS di Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau, dan mampu melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah risiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan masyarakat.	Jumlah rumah tangga ber PHBS di bagi jumlah rumah tangga yang di data dikali 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
101		Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	Persen	Penduduk yang Dilakukan Pengukuran Kebugaran Pada Anak Sekolah SD Kelas 4 s/d kelas 6, SMP, SMA, Usia Produktif, dan Usia Lanjut dengan hasil Minimal Cukup	Jumlah total pengukuran kebugaran dengan hasil "Cukup" Anak Sekolah SD Kelas 4 s/d Kelas 6, SMP, SMA, Usia Produktif, dan Usia Lanjut dibagi jumlah sasaran yang diperiksa dikali 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
102	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat	Mitra	Kemitraan pemberdayaan masyarakat adalah suatu hubungan kerja sama antara dua atau lebih pihak, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat sipil di tingkat Kabupaten untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan potensi lokal.	Jumlah kelompok Pemberdayaan kemitraan masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah di Kabupaten	Akhir Tahun	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
103	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Akhir Tahun	Dinkesda
104	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Rumah Tangga	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota keluarga agar mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat.	Jumlah Rumah Tangga yang melaksanakan Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
105		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Persen	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 10-21 tahun yang merokok dengan jumlah penduduk umur 10-21 tahun. definisi merokok adalah merokok tembakau maupun cerutu baik tiap hari maupun kadang-kadang	Jumlah penduduk umur 10-21 tahun yang merokok dibagi jumlah semua penduduk umur 10-21 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%)	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
106	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Akhir Tahun	Dinkesda
107	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif Bidang Kesehatan	Persen	Persentase posyandu aktif Bidang Kesehatan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak posyandu yang menjalankan kegiatan rutinnnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Posyandu aktif biasanya diukur berdasarkan frekuensi kegiatan, jumlah kader, dan cakupan layanan yang diberikan kepada Masyarakat dalam Siklus Hidup	Jumlah Posyandu Aktif bidang Kesehatan di bagi seluruh posyandu yang ada di kali 100	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
108	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Akhir Tahun	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
109	Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Dinas Kesehatan Daerah	Indeks Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah	Angka	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya Pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.	<p>Berdasarkan pada Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2023 Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator Nilai F03: Nilai F03 x bobot per indikator</p> <p>b. Menentukan Nilai Setiap Aspek Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek: \sum nilai per indikator</p> <p>c. Menentukan Nilai Indeks Formulir Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Formulir:</p> $\sum (Nilai\ per\ aspek_n \times\ bobot\ aspek_n)$	Semester I dan Semester II	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>d. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks Formulir- 02+25% Nilai Indeks Formulir-03.</p>		
110		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Daerah	Angka	Perolehan nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP	Hasil evaluator reuiu SAKIP Internal	Triwulan III Atau IV	Dinkesda
111	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah	Persen	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. IKM menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pelayanan publik dan mendorong reformasi birokrasi yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan	<p>Komponen IKM (Berdasarkan PermenPANRB No. 14 Tahun 2017) 1. Penilaian Semesteran Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$ <p style="font-size: small; margin: 0;">N = bobot nilai per unsur</p> </div> <p>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ </div> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka</p>	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$ </div> <p>2. Pengukuran Tahunan Merupakan rata-rata nilai dari semester satu dan dua, dengan rumus Nilai Semester satu ditambah dengan Nilai Semester dua dibagi dua.</p>		
112	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi tersusun	Dokumen	Dokumen perencanaan Renstra, Renja, RKA, DPA dan Dokumen evaluasi LKJIP, LPPD, LKPJ, Laporan SPM, Profil Kesehatan	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi dinas kesehatan	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
113	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
114	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Triwulan I dan Triwulan IV	Dinkesda
115	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Triwulan I dan Triwulan IV	Dinkesda
116	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Triwulan I atau II	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
117	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Laporan	Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Akhir Tahun	Dinkesda
118	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Perbulan	Dinkesda
119	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Akhir Tahun	Dinkesda
120	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akhir Tahun	Dinkesda
121	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	Laporan	laporan Barang Milik Daerah (BMD) adalahDokumen pencatatan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dilakukan pemeliharaan dalam satu periode waktu anggaran	Jumlah laporan BMD dalam satu tahun anggaran Dinas Kesehatan Daerah yang sudah direkonsiliasi	Akhir Tahun	Dinkesda
122	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
123	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persen	Administrasi kepegawaian perangkat daerah adalah serangkaian kegiatan pengelolaan, pengaturan, dan pengendalian sumber daya manusia (pegawai) di lingkungan pemerintah daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian dalam satu tahun anggaranDinas Kesehatan Daerah yang terpenuhi	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
124	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Akhir Tahun	Dinkesda
125	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Triwulan II, III, dan IV	Dinkesda
126	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Triwulan II, III, dan IV	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
127	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran dalam suatu perangkat daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang terpenuhi	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
128	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
129	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
130	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
131	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
132	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
133	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Akhir Tahun	Dinkesda
134	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Akhir Tahun	Dinkesda
135	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Akhir Tahun	Dinkesda
136	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Akhir Tahun	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
137	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Akhir Tahun	Dinkesda
138	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	Barang yang diadakan Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dalam satu periode waktu anggaran	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang diadakan dalam satu periode waktu anggaran	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
139	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
140	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
141	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
142	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
143	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Persen	Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah adalah layanan yang disediakan untuk mendukung operasional dan kelancaran tugas-tugas Perangkat Daerah	Prosentase jasa penunjang urusan PD yang tersedia	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
144	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Akhir Tahun	Dinkesda
145	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Akhir Tahun	Dinkesda
146	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Akhir Tahun	Dinkesda

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>yang Disediakan</i>					
147	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	Unit	Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dilakukan pemeliharaan dalam satu periode waktu anggaran	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan pemeliharaan dalam satu periode waktu anggaran	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
148	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>Unit</i>	<i>Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>Triwulan I, II, III, dan IV</i>	<i>Dinkesda</i>
149	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>Unit</i>	<i>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>Triwulan I, II, III, dan IV</i>	<i>Dinkesda</i>
150	<i>Pemeliharaan Mebel</i>	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	<i>Unit</i>	<i>Mebel yang Dipelihara</i>	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	<i>Triwulan I, II, III, dan IV</i>	<i>Dinkesda</i>
151	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>Unit</i>	<i>Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>Triwulan I, II, III, dan IV</i>	<i>Dinkesda</i>
152	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>Unit</i>	<i>Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>Triwulan I, II, III, dan IV</i>	<i>Dinkesda</i>
153	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>Unit</i>	<i>Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>Triwulan I, II, III, dan IV</i>	<i>Dinkesda</i>

NO	LEVEL INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	JADWAL RILIS	INSTANSI PERILIS
1	2	3	4	5	6	7	8
154	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
155	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasyankes yang Melakukan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD& PKM)	Unit Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Fasyankes	Jumlah Fasyankes (RSUD& Puskesmas) yang Melakukan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda
156	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Triwulan I, II, III, dan IV	Dinkesda